Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Newsletter X
Juli - Desember 2019


Akuntabilitas


FKPAR


FMS



FEMOKRAT


FPM


Cerita Perubahan



Kementerian PPN/ Bappenas

MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Konsorsium PERMAMPU

Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Pimpinan Redaksi	Dina Lumbantobing	Kontributor	Direktur Eksekutif
Sekretaris Redaksi	King Ronald Silalahi		Koord Program
Editor Tulisan	Dina Lumbantobing		Staf Lapang Lembaga Anggota

SEKRETARIAT PERMAMPU
Jl. Pancur Siwah No. 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com Telp/Fax. 061-8361102
Facebook : PermampuConsortium, www.permampu.org

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Selamat Tahun Baru 2020, dan selamat bertemu di edisi ke 10 Newsletter kita.
Akhir dari tahun kelima dari Program Advokasi HKSR telah tiba. Tinggal satu semester lagi, program ini akan berakhir.
Di antara Juli sampai akhir Desember 2019, ada dua kegiatan besar yang menjadi sorotan kita di Permampu, yaitu pertemuan Forum Perempuan (& Laki-laki) Muda/FPM se Sumatera di Lampung, serta Youth Health Forum di Jakarta. Keberlanjutan program ini ada di tangan generasi muda kita, dan kita harap aksi kolektif mereka akan mempengaruhi kebijakan dan kualitas layanan HKSR di local sampai ke tingkat Nasional.
Selain kegiatan Perempuan Muda dan laki-laki sebagai pendukung, 3 buah tulisan pengalaman Permampu dalam hal Penguatan Ekonomi Perempuan, Pendidikan Perempuan Potensial dan Penyelenggaraan OSS&L sebagai inovasi program kita, telah selesai. Diharapkan ketiga tulisan ini dapat menjadi buku elektronik setelah diedit oleh MAMPU yang memperkaya pendekatan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Program Advokasi HKSR perempuan di tempat lain.
FKPAR yang merupakan wadah seluruh kelompok perempuan dampingan Permampu, di semester ini juga cukup aktif. Mereka mengkampanyekan penghapusan perkawinan di usia anak dan kekerasan seksual, melalui sosialisasi UU no 16 tahun 2019 yang menyatakan usia minimum perkawinan untuk perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun di 8 provinsi, baik di 16 Hari Aktivisme, maupun di Hari Ibu/Pergerakan Perempuan Indonesia.
Menjelang akhir 2019, Permampu juga melaksanakan PrimeL di Medan, yaitu monitoring secara partisipatoris keorganisasian dan program Advokasi HKSR, yang dihadiri oleh perwakilan FMS, termasuk Tokoh Agama dan Femokrat.
Untuk lebih lengkapnya, informasi lebih rinci dari seluruh kegiatan Permampu dapat dilihat di dalam newsletter ini. Terimakasih.

Salam solidaritas.
Dina Lumbantobing.
Koordinator Pelaksana Permampu.

DAFTAR ISI

1. Editorial
2. Salam Redaksi
3. Akuntabilitas
4. FKPAR
5. FMS
6. Femokrat
7. FPM
8. Cerita Perubahan

Kementerian PPN/ Bappenas
Australian Government
MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Konsorsium PERMAMPU

KEUANGAN DAN CAPAIAN PERMAMPU
PERIODE : 1 JULI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

KEUANGAN PERMAMPU

Sesuai dengan kebijakan MAMPU, periode akhir program MAMPU diperpanjang dari Desember 2019, menjadi Juni 2020. Hal ini cukup menggembirakan bagi Permampu untuk dapat mengejar berbagai Rencana Kerja yang belum tercapai. Ini karena dibanding mitra MAMPU lainnya yang sudah mulai di tahun 2012, Permampu baru menyusul di tahun 2014 yang diawali dengan penelitian, barulah program didesain dan dimulai. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan alokasi anggaran dan adanya kesempatan melakukan reschedule atas rencana kerja yang sudah dijadwalkan.
Dari segi serapan dana untuk program dan operasional anggota Permampu untuk tahun 2019, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Lembaga	Budget	Realisasi	Saldo	%
Flower	748,561,000	560,558,110	188,002,890	74.88
Pesada	975,980,000	792,635,292	183,344,708	81.21
PPSW	663,927,500	559,281,836	104,645,664	84.24
LP2M	614,645,000	454,281,732	160,363,268	73.91
APM	641,830,000	477,518,624	164,311,376	74.40
CP WCC	704,273,080	605,244,482	99,028,598	85.94
WCC Palembang	547,666,000	369,151,388	178,514,612	67.40
DAMAR	643,639,292	587,157,177	56,482,115	91.22
Host	3,319,623,001	1,495,696,332	1,823,926,669	45.06
Total	**8,860,144,873**	**5,901,524,973**	**2,958,619,900**	**66.61**

Bila dibandingkan dengan serapan seluruh lembaga, Host Permampu adalah yang terendah (45%). Hal ini adalah karena perpanjangan periode program MAMPU, beberapa aktivitas yang harusnya dilaksanakan di akhir program (2019) digeser ke tahun 2020, misalnya: Evaluasi Eksternal, pertemuan FKPAR dan FMS serta Perempuan Muda yang menyerap dana cukup besar.

Sementara itu untuk serapan dana MO (Management Overhead), dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Lembaga	Budget	Realisasi	Saldo	%
Flower	133,311,000	83,909,229	49,401,771	62.94
Pesada	178,850,933	94,034,114	84,816,819	52.58
PPSW	116,453,575	65,302,661	51,150,914	56.08
LP2M	106,561,864	60,362,041	46,199,823	56.65
APM	111,957,483	57,588,041	54,369,442	51.44
CP WCC	124,495,013	60,023,023	64,471,990	48.21
WCC Palembang	93,066,283	43,771,866	49,294,417	47.03
DAMAR	111,834,640	81,045,965	30,788,675	72.47
Host	366,172,336	83,867,295	282,305,041	22.90
Total	**1,342,703,127**	**629,904,235**	**712,798,892**	**46.91**

Penjelasan untuk serapan MO Host, sama dengan penjelasan untuk serapan program dan operasional, karena besarnya MO ditentukan oleh besarnya serapan dana program dan operasional.



Tim Keuangan Anggota Permampu dalam PrimeL 2019

CAPAIAN PROGRAM PER DESEMBER 2019

Dalam periode ini, Konsorsium Permampu telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Semester 2 tahun 2019. Adapun indicator capaian untuk semester ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Jumlah	Jumlah Anggota	
		Perempuan	Laki-Laki
1. Jumlah Kelompok Ekonomi. 1. Jumlah Kelompok 2. Jumlah Saham 3. Jumlah Pinjaman Beredar 4. Sisa Hasil Usaha.	582 kelompok Rp 53.078.213.548 Rp 56.986.916.410 Rp 9.666.249.189,-.	27.545	
2. Jumlah perempuan muda yang aktif dan dilatih.	27 kabupaten/kota	1.533	
3. Jumlah pembatra yang terlibat dalam program.	4 kabupaten/kota	129	
4. Anggota dan Pengurus FMS yang aktif.	26 kabupaten/kota	94	61
5. Jumlah Kelompok Kepentingan Yang Terlibat dalam Program	26 kabupaten/kota	1.134	774
6. Jumlah Femokrat	30 kabupaten/kota	96	1
7. Jumlah perempuan korban KTP yang ditangani langsung.	26 kabupaten/kota	238	
8. Jumlah perempuan yang difasilitasi mengakses layanan kesehatan.	26 kabupaten/kota	1.425	
9. Jumlah aparatur Pemerintah terlibat dalam program tingkat desa hingga kabupaten/kota.	26 kabupaten/kota	348	127
10. Jumlah tokoh agama yang difasilitasi	26 kabupaten/kota	37	62
11. Jumlah perempuan disabilitas yang dijangkau.	26 kabupaten/kota	36	4
12. Jumlah lansia yang dijangkau.	26 kabupaten/kota	1.281	

Di periode ini ada 2 kebijakan yang berhasil diadvokasi yaitu di Aceh (MoU Flower Aceh dengan Fakultas Dahwah UIN Arraniri tentang magang mahasiswa) dan Jambi (MOU APM- Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sarolangun tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sarolangun). Sementara 20 kebijakan lainnya sedang diadvokasi di 6 provinsi lainnya.

Implementasi OSS&L sebagai Model Layanan HKSR-Gizi semakin berkembang yang saat ini ada di 17 lokasi di 7 provinsi, sementara di SUMSEL sedang dalam tahap akhir persiapan. Juga telah dilakukan evaluasi pelaksanaan OSS&L dimana berbagai masukan antara lain berupa pentingnya penyediaan ruang khusus untuk OSS&L.

AKTIVITAS PERMAMPU

Dalam periode ini Permampu dan Host melaksanakan berbagai aktivitas yang menyangkut peningkatan kapasitas, menghadiri rapat, lokakarya, seminar dan konperensi; serta produksi pengetahuan, sebagaimana disajikan dalam table di bawah ini:

Kegiatan	Waktu dan Tempat	Pelaksana/Peserta
Monitoring WCC Palembang	Palembang, 3-4 Juli 2019	Koord. Permampu
Rapat Permampu	Bukittinggi, 30-31 Juli 2019	Host, Koordinator, Pengurus & Pengawas Permampu, Direktur anggota Permampu.
Monitoring LP2M	Padang, 1-2 Agustus 2019	Koord.Permampu
Mengikuti National Youth Forum	Jakarta, 3-5 Agustus 2019	Collective Action YKP, Aisyiah & Permampu. /Koord.Permampu, perwakilan FPM Permampu (FA, Pesada, CP WCC, Damar).
Pertemuan FPM Sumatera & Pendidikan Inklusi Disabilitas	Bandarlampung, 1-4 September	FPM 8 Lembaga Anggota Permampu Direktur 8 Lembaga Anggota Permampu, Host dan Koord.Permampu.
Work-plan workshop MAMPU for 2020	Jakarta, 5-6 September 2019	Koord.Permampu, Host, CP WCC.
ICIFPRH Conference. Presentasi Koord.Permampu & Wakil FPM "My Body My Rights"	1-2 November 2019	Koordinator Permampu. Perwakilan FPM Sumatera (FA, Pesada, CP WCC, WCC Palembang)
Mengikuti dan menjadi pembicara di	Jakarta,	MAMPU.

Konferensi Nasional MAMPU: "Sinergi Masyarakat Sipil, Pemerintah dan Parlemen untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia" Presentasi OSS&L	27 November 2019	Koord.Permampu, CP WCC, Pesada, Flower Aceh, Damar. Perwakilan Pemerintah: Gubernur Bengkulu, 3 Kepala Dinas Kab.Dairi, BAPPEDA Aceh Utara
Mengikuti dan menjadi pembicara di Dialog Indonesia-Australia: "Kepemimpinan Perempuan di Sektor Publik". Presentasi: "Femokrat"	Jakarta, 28 November 2019	Prospera. Koord.Permampu, Flower Aceh, Damar. Bappeda Aceh Utara, Wakil Gubernur Lampung.
Mengikuti Sustainability Pathways Dissesminantion Event & Workshop Keberlanjutan Kopernik	Jakarta, 28 - 29 November 2019	MAMPU & Kopernik. LP2M, Flower Aceh, Pesada, CP WCC.
Mengikuti Pitching Training dan *DEVI Speed Date*	Jakarta, 6 – 7 Desember 2019	MAMPU Host & WCC Palembang
Mengikuti Poverty Workshop "Mengukur Kemiskinan untuk Menginformasikan Kebijakan"	Jakarta, 11 Desember 2019	MAMPU CP WCC
Penulisan 3 pengalaman Permampu: • Pengalaman Penguatan Ekonomi Perempuan. • Pengalaman Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Perempuan Potensial • Pengalaman Pelaksanaan Innovasi Layanan dan Pembelajaran HKSR Perempuan: OSS&L	Semester 2019	Koordinator Permampu Tim Penulis • Ramida Sinaga, Endang Sulfiana. • Berliana Purba, Lily Sutiyem • Artety Sumeri, Ramida Sinaga, Sely Fitriyani



Permampu hadir dalam ICIFPRH Conference di Yogyakarta



Wakil Gubernur Lampung hadir mewakili Permampu dalam Dialog Indonesia-Australia: "Kepemimpinan Perempuan di Sektor Publik".

PELAKSANAAN DAN HASIL PrimeL
(Participactory Integrated Monitoring, Evaluation and Learning)
Permampu

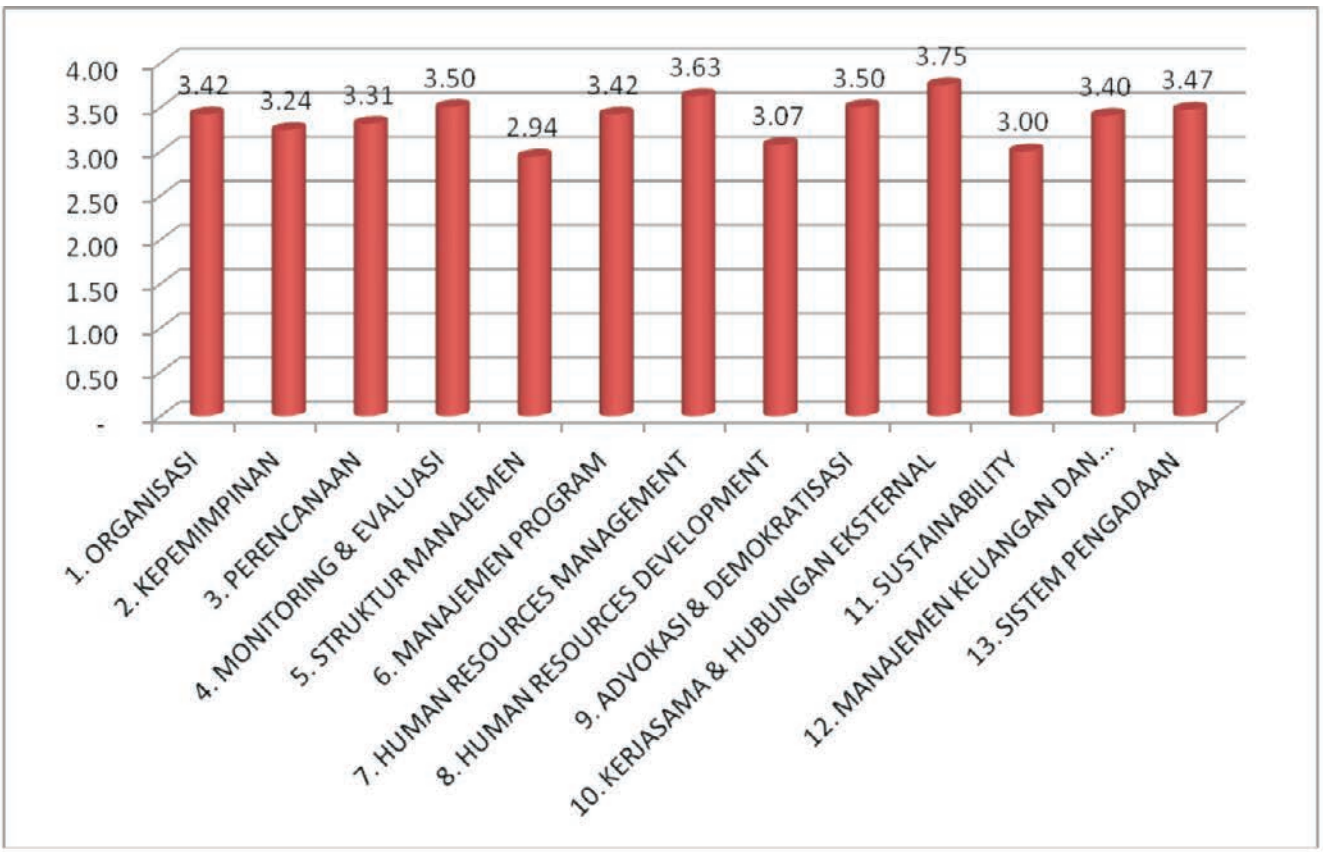
Pada tanggal 19-21 November 2019, PERMAMPU sebagai konsorsium melaksanakan lokakarya di Medan untuk memonitor perkembangan keorganisasian dan pelaksanaan program PERMAMPU. Acara ini dihadiri oleh 54 orang peserta (45 perempuan, 9 laki2) dari kedelapan povinsi dampingan Permampu. Selain kedelapan Direktur, 2 Host dan 2 Pengurus/Koordinator; peserta adalah personil keuangan kedelapan lembaga, staff lapang dan perwakilan pemanfaat (khususnya FKPAR atau FMS).
PrimeL adalah sebuah alat MONEV dan Pembelajaran dimodifikasi dari alat bernama IDF (Institutional Development Famework) dan Fiduciary Keuangan yang digunakan MAMPU; dengan aspek pembelajaran yang kuat di seluruh proses dan hasil untuk lembaga (Permampu). PrimeL telah digunakan oleh Permampu sejak 2018, yang digunakan secara partisipastoris, dan dilaksanakan setiap tahun di setiap lembaga anggota Permampu. Tetapi khusus untuk tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir penyelenggaraan PrimeL, dilakukan untuk PERMAMPU sebagai institusi.

Adapun hasil umum dari PrimeL ini menunjukkan Konsorsium Permampu berada di tahap berkembang menuju mapan, yang dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini:

- Dari segi pengelolaan internal & hubungan eksternal telah mencapai tingkat matang, yaitu pengelolaan sumber daya manusia di Permampu serta kerjasama dan hubungan internal. Ini menunjukkan bahwa Permampu betul-betul menerapkan sistim pengelolaan personalia di dalam yang menyangkut kualitas dan pengembangan secara professional.
- Monitoring dan Evaluasi serta Advokasi & Demokratisasi adalah aspek kedua yang cukup membanggakan yang dapat menjadi indikator pengawalan proses dan hasil advokasi HKSR, baik secara organisastoris lembaga, keuangan dan implementasi program.
- Sistim Pengadaan (menyangkut aturan & implementasi ke anggota Permampu) dan Organisasi (Visi, Missi, Struktur) serta Manajemen Program (Gender dalam pengambilan keputusan) menjadi aspek berikut yang menunjukkan komitmen dan konsistensi terhadap penguatan kepemimpinan perempuan.

Sementara itu hal-hal yang masih lemah dan perlu diperbaiki adalah keragaman & inklusifitas personil lembaga, serta partisipasi staff dalam manajemen. Kaum perempuan/kelompok etnis minoritas kurang terwakili dalam jajaran Pengurus.
Dibutuhkan upaya khusus untuk menangani masalah ini, sehingga anggota Permampu tidak dilihat sebagai lembaga yang homogen dalam hal kesukuan dan keyakinan/agama.
Secara khusus status hukum dan keberlanjutan Permampu yang memperoleh nilai rendah akan menjadi topic diskusi khusus dalam Rapat Anggota yang akan dilaksanakan di awal 2020.
Dari segi program, beberapa hal dalam tabel bawah ini menjadi hal-hal yang perlu direspons oleh anggota Permampu di 2020:

Tujuan / EOPO	Masalah
EOPO 1: Perempuan akar rumput(pedesaan, miskin kota, muda (12-20 tahun) mempunyai kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi untuk pemenuhan HKSR)	• Belum semua anggota kelompok perempuan dampingan menjadi anggota CU/koperasi. • Belum semua kelompok melakukan RAT untuk tahun buku 2018. • Masyarakat masih tabu membicarakan langsung persoalan kekerasan dan seksualitas. • FKPAR belum menjadi penggerak advokasi perempuan di level provinsi dan Kab./Kota.
EOPO 2: Perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam layanan Kesehatan- HKSR yang mudah, cepat, tepat dan bermutu	OSS&L belum dipahami dan dikenal oleh masyarakat dan Dinas terkait. OSS&L belum diterima baik meski telah ada MOU. Masih ada pengurus FKPAR yang belum berfungsi . MOU tim layanan masih draft. Masih ada SK tim OSS&L Puskesmas yang belum defenitif) Pembatra sulit mendapatkan ijin operasional karena kondisi tempat usaha tidak memadai dan sulit memenuhi syarat pengurusan
EOPO 3: Institusi keluarga, adat dan agama melakukan perubahan aturan adat dan tafsir agama terkait Kesehatan-HKSR	Tokoh agama dan tokoh adat yang terlibat jumlahnya masih terbatas. Masih ada tokoh agama dan adat yang tabu membicarakan HKSR Champion laki-laki belum muncul di semua *nagari*. Penghargaan Keluarga Peduli/Desa Peduli HKSR belum diadopsi pemerintah.
EOPO 4: Pemerintah desa dan kab/kota membuat kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Kesehatan dan HKSR	Masih minim anggaran (APBD dan APBDES) untuk pemenuhan HKSR. Alokasi ADD untuk PPA belum ada. Mutasi dan pergantian jabatan di institusi jabatan di institusi pemerintah yang menjadi anggota PNS.





Peserta PrimeL Permampu

FORUM KOMUNITAS PEREMPUAN AKAR RUMPUT (FKPAR)



FKPAR Aceh

Upaya peningkatan kapasitas dan kualitas kesehatan seksual reproduksi kelompok perempuan di desa dilakukan melalui diskusi kritis bulanan terhadap 761 orang pengurus dan anggota FKPAR dan 229 Perempuan Muda di 3 kabupaten: kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Besar dan Aceh Utara tentang kepemimpinan perempuan, Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi, dampak pernikahan usia anak, substansi UU No 16 2019 tentang perubahan atas UU No 01 tahun 1974, berbagai penyakit menular seksual dan upaya penanganannya, pentingnya deteksi dini KSR; kanker serviks dan payudara, jenis - jenis kekerasan seksual dan cara pencegahan.

Terkait partisipasi di ranah publik dan politik, FKPAR menempati posisi strategis dan pengambil kebijakan di tingkat desa sampai ke tingkat kabuaten/kota. Saat ini tercatat sebanyak 152 anggota Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Flower Aceh di 3 kabupaten/kota yang sudah menempati posisi-posisi penting di desanya sebagai Tuha Peut desa/legislatif desa, aparatur desa, pengurus partai politik, pengurus organisasi kemasyarakatan di desa, anggota Majelis Adat Aceh (MAA), paralegal komunitas, kader stunting, kader pemberdayaan masyarakat, pengurus PKK, Kaur, Kader Posyandu, pengurus harian karang taruna, serta pemimpin pengajian di masyarakat (khusus perempuan atau anak) dan lainnya.

Pada saat yang sama upaya pengatan kemandirian ekonomi perempuan juga dilakukan melalui pengelolaan CU yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, penguatan manajamen usaha, serta asistensi pengembangan usaha kelompok. FKPAR terkuatkan melalui partisipasi aktif sebagai pengurus dan anggota CU. Melalui CU, anggota aktif menabung dan mendukung perkembangan usaha dengan menggunakan pinjaman CU sehingga sangat mendukung kesusksesan usaha yang di jalani, serta meningkatkan pendapatan perempuan dan keluarga. Pada periode ini jumlah CU di 3 Kabupaten/Kota sebanyak 19 CU dengan anggota 525 orang dan 1 anggota CU laki – Laki, total saham keseluruhan sebesar Rp 86.869.500,- dan total pinjaman Rp 17.976.500.

Berkat penambahan modal usaha dari CU, berbagai usaha, kebun dan lahan pertanian yang dikelola kelompok perempuan berkembang. 95 orang anggota CU Aceh Utara memiliki usaha tanaman hydroponik, tas kerawang Aceh, jasa jahit, penjualan dodol Aceh, keripik, dan tenun baju (bordir), menganyam tikar, membuat tas dari bahan daur ulang, membuat tas rajut, bertani, Kios, Pangkalan Gas, jual telur asin, jual beli pinang, dan BBM. Sebanyak 50 orang anggota CU Pidie memiliki usaha jasa jahit, bertani, pembuatan tikar, dan dagang tupperwear, pembuatan emping melinjo, keripik pisang, kios kaki lima,Warteg, dan berkebun. Terdapat 7 KPM remaja di Pidie yang membuka usaha jahit dan jual barang via online. Sementara 47 orang anggota CU Banda Aceh memiliki usaha rumahan berupa kios kaki lima, kue kering dan kripik, snack dan kue kotak, bakso bakar, tas kerawang Aceh, ikan kayu, dendeng ikan, tupperwear, jagung bakar,jualan nasi sarapan pagi, salon kecantikan, jahit sepatu, sayuran organik, obat herbalis dan kentang goreng serta usaha jasa jahit dan privat/custum. Selain itu, pengembanagn CU kelompok juga membantu perempuan jika ada kebutuhan urgent dalam keluarga, seperti kebutuhan biaya pendidikan anak, rehap rumah.









Proses Diskusi Kritis KPM dan Kelompok Muda Flower Aceh di Kabupaten/Kota Aceh Utara, Banda Aceh dan Pidie

FKPAR Sumatera Utara

Pada pertemuan FKPAR Kabupaten Pakpak Bharat dilakukan pembahasan tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pembahasan sekilas 17 TPB sebagai pengantar diskusi kemudian diperdalam pada tujuan 1-5 dikaitkan dengan persoalan perempuan yang terjadi di Kabupaten & Desa wilayah Pakpak Bharat. Hal ini dilaksanakan agar kelompok perempuan mengetahui masalah-masalah seputar tujuan 1-5 sehingga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan di desa dengan menyuarakan kebutuhan dan kepentingan perempuan melalui rapat & musyawarah desa. Selanjutnya, FKPAR mendiskusikan Matrix SDGs yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai dokumen kelengkapan Pemerintah.

Kegiatan Aksi Bersama dengan tema "Anak Bukan Pengantin! Bersama Kita Bisa Cegah Perkawinan Anak/Dini"

Kegiatan Aksi Bersama pada perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 23 Juli 2019 secara serentak dilaksanakan di Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Samosir serta Nias. Kegiatan di masing-masing kota melibatkan peserta minimal 100 orang, sehingga total peserta yang hadir 1.107 orang (815 perempuan, 292 laki-laki) yang merupakan perwakilan dari berbagai pihak yaitu perwakilan Sekolah Menengah Atas/sederajat, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan orangtua & perwakilan Pemerintah (Pemberdayaan Perempuan & P2TP2A, Dinas Kesehatan, Departemen Agama.

Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di kabupaten Langkat & Nias Barat pada bulan November dan perayaan Hari Ibu dilaksanakan di Medan pada bulan Desember 2019.





Kampanye Perayaan Hari Anak di Langkat dan Samosir

Aksi Kolektif di Perayaan Hari Ibu/Hari Pergerakan Perempuan Indonesia

Dengan tema "BERGERAK BERSAMA & CERDAS MENUJU 2020", Aktivis & LSM Perempuan Sumut, FKPAR dan organisasi perempuan merayakan Hari Ibu sebagai Hari Pergerakan Perempuan Indonesia dengan tujuan menguatkan perspektif, pengetahuan; dan membangun kekuatan seluruh kelompok perempuan serta para aktivis perempuan untuk pergerakan perempuan menuju kesetaraan gender di Sumatra Utara. Para nara sumber yang terdiri dari aktivis dan akademisi bersama belajar mengenai Sejarah Gerakan Perempuan, mendiskusikan soal Penghapusan Perkawinan Anak yang sebenarnya telah digugat perempuan sejak 1928, SDGS serta Kemandirian Perempuan & Eonomy Digital.

Acara dihadiri oleh 170 orang (termasuk 4 laki-laki), terdiri dari para perempuan dan pendukung yang percaya kepada pentingnya Gerakan Perempuan untuk Kesetaraan Gender di SUMUT, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil perempuan/ penguatan perempuan (PEKKA, Bitra, Perempuan Lansia, Perempuan Disabilitas, YAPIDI, WCC, P2TP2A, Aktivis Perempuan, FKPAR, Credit Union, Serikat Pekerja Rumahan, Organisasi Perempuan Independen, Kader, dll), Jurnalis Perempuan, Femokrat (Feminist Birokrat), Akademisi Perempuan, perwakilan mahasiswi/ pelajar di SUMUT dan laki-laki pendukung yang sadar gender. Akhir kegiatan tersebut disepakati beberapa kegiatan bersama untuk dilakukan pada tahun 2020 pada moment perayaan hari-hari besar terkait perempuan.



Pembukaan Acara oleh Panitia Perayaan Hari Ibu/Pergerakan Perempuan di Medan

FKPAR Sumatera Barat

Pada semester ini, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumatera Barat melakukan dua kali Kegiatan Aksi Bersama untuk mengkampanyekan "Akhiri Perkawinan Usia Anak". Kegiatan Aksi Bersama dilaksanakan di Kota Padang dalam rangka Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) pada 28 Juli 2019 dan Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) pada 5 Desember 2019. Lebih dari 150 orang peserta terlibat pada Kegiatan Aksi Bersama HAN yang terdiri dari FKPAR, FMS, FPM, media dan LSM Sumatera Barat dari Kota Padang,

Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Tanah Datar. Sedangkan pada Aksi Bersama HAKTP, sebanyak 65 orang (34P, 31L) dari provinsi dan 3 kab./kota (Padang Padang Pariaman, Tanah Datar) yang terdiri dari OPD, Kemenag, Pengadilan Tinggi Agama, wali nagari/lurah, tokoh adat, tokoh agama, KUA, camat, Puskesmas, kader FPM, kader FKPAR, LSM Sumbar, media dan tim LP2M.



Aksi Bersama "STOP Perkawinan Usia Anak" pada Perayaan HAN 2019

Aksi Bersama HAN dilaksanakan pada Acara *Car Free Day* di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Pada kegiatan ini, FKPAR melakukan orasi di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman untuk menyerukan agar semua pihak turut melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak. Berbeda dengan Aksi Bersama HAN, Aksi Bersama HAKTP dilaksanakan dalam bentuk diskusi tematik tentang UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersama dua orang narasumber dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, H. Efi Yoskar, S.Ag, M.M. dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag. Tujuan kegiatan ini adalah mendiseminasikan UU No 16 Tahun 2019 kepada para pihak dan mendorong agar para pihak mengawal implementasi UU ini untuk pencegahan perkawinan usia anak. Undang-undang No 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila usia anak perempuan dan laki-laki telah mencapai usia 19 tahun. Dalam UU ini tidak ada lagi diskriminasi batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sehingga diharapkan mampu menjadi acuan hukum yang tegas bagi semua pihak untuk mencegah perkawinan anak di bawah 19 tahun.



Suasana Diskusi dalam Kegiatan Aksi Bersama HAKTP 2019

Seminggu sebelumnya, FKPAR Sumatera Barat juga terlibat dalam Aksi Bersama "Perlindungan untuk Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)" pada 29 November 2019 di Bundaran DPRD Provinsi Sumatera Barat. Aksi bersama ini dilakukan bersama Jaringan Peduli Perempuan dan Komunitas Pembela HAM dengan tujuan untuk menyuarakan pentingnya perlindungan bagi perempuan pembela HAM. Selama ini, perempuan pembela HAM masih mendapatkan perlakuan tidak adil dari berbagai pihak bahkan dari aparat penegak hukum. Dalam aksi ini, FKPAR juga menyuarakan perlindungan bagi Era Purnama Sari, aktivis yang justru difitnah dan mengalami persekusi dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM di Jambi Agustus 2019 lalu.



Anggota FKPAR Mengikuti Aksi Bersama "Perlindungan untuk Perempuan Pembela HAM"

FKPAR Riau

Dalam rangka kegiatan Perayaan Hari Pangan Sedunia, PPSW Sumatra mengadakan kegiatan Penguatan FKPAR Provinsi Riau dan dialog public yang dilaksanakan pada tanggal 16–17 Oktober 2019 di hotel Grand Zury, Pekanbaru. Peringatan ini bertujuan untuk menguatkan peran perempuan dalam pemenuhan hak pangan dan pencapaian SDG's goals khususnya goal 1-5".

Pada tanggal 16 Oktober 2019 dilakukan Penguatan FKPAR Provinsi Riau dimulai dengan membahas review rencana kerja FKPAR Riau dan persiapan dialog public. Pada tanggal 17 Oktober 2019 merupakan puncak Perayaan Hari Pangan Sedunia yang dibuka oleh Wakil Gubernur Riau. FKPAR Provinsi Riau membacakan pernyataan bersama dihadapan wakil Gubernur Riau, kemudian ketua FKPAR Provinsi Riau menyerahkan pernyataan bersama tersebut kepada wakil Gubernur Riau. Sebagai symbol tuntutan untuk pemenuhan Hak Pangan kepada rakyat khususnya perempuan akar rumput. Acara dilanjutkan dengan dialog public dengan narasumber Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau. Lokakarya Penguatan FKPAR tingkat propinsi Riau ini juga menghasilkan agenda advokasi FKPAR ditingkat kab./kota dan provinsi yang akan melanjutkan advokasi Perdes Pencegahan Perkawinan

anak di kabupaten Rokan Hilir, meningkatkan jumlah pemimpin perempuan melalui BPD/ BPKep, Ketua RT, RW di Rokan Hilir, Kampar, Pekanbaru. Serta meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan akar rumput, seperti tes IVA , OSSL dan layanan kesehatan dasar.



PPSW Sumatra – Kampanye 16 HAKTP di Pekanbaru, Riau



Penyerahan Statement Bersama oleh FKPAR Riau ke Wakil Gubernur Riau

Kegiatan lain yang diikuti oleh FKPAR dan FPM Provinsi Riau adalah Perayaan 16 HAKTP yang diselenggarakan oleh PPSW Sumatra bersama KASAI (Koalisi Anti Diskriminasi) dalam aksi bersama di *Car Free Day (CFD)* Pekanbaru, Dialog Publik, dan Audiensi bersama Asisten I Gubernur Riau. Aksi bersama dilakukan di CFD Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2019 bertujuan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat luas tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, hapuskan perkawinan anak, dan mendukung usia perkawinan 19 tahun. Puncak perayaan 16 HAKTP dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Desember 2019 yang dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dengan kegiatan dialog public bersama narasumber dari DPRD, Kemenag, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, serta Pemerhati Perempuan dan Anak Provinsi Riau. Kemudian dilanjutkan audiensi ke Gubernur Riau yang diterima oleh Asisten I dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menyampaikan persoalan-persoalan kekerasan perempuan dan kelompok marginal lainnya seperti kekerasan terhadap perempuan disabilitas, perkawinan anak, hambatan kepemimpinan perempuan, dan gizi buruk serta stunting. Perayaan ini diakhiri dengan menyusun agenda untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak di tingkat kabupaten kota dan propinsi Riau.





FPM mengikuti Aksi bersama Perayaan 16 HAKTP Audiensi Bersama Asisten 1 Gubernur Riau

FKPAR Jambi

Untuk melakukan penguatan kepada Kader Perempuan Potensial dari FKPAR, Aliansi Perempuan Merangin pada tanggal 16 – 18 September 2019 mengadakan lokakarya tentang SDGs bertempat di Aula Taman Indah Lestari, Talang kawo Bangko - Merangin. Tema Lokakarya ini adalah: "Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif". Kegiatan ini difasilitasi oleh Ulfa Mahfudz dari KPI wilayah Jambi, dan fasilitator internal APM. Adapun peserta dalam lokakarya ini adalah 25 orang kader perempuan potensial yang berasal dari FKPAR perwakilan Kabupaten Merangin, Bungo dan Sarolangun. Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber yaituBappeda Kabupaten Merangin dengan tema:"Persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan pembangunan gender dalam RAD SDGs Kabupaten Merangin". Dan Dinas Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/DPPMPD, dengan tema "Kebijakan Responsif Gender/GAP melalui Advokasi Dana Desa".

Kegiatan Lokakarya ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Peserta mampu mengenali goal, indikator dan prinsip dari TPB/SDGs

2. Peserta memahami persoalan- persoalan di lingkungannya yang berkaitan dengan goal–goal yang ada dalam SDGs.
3. Memperkuat pemahamaman tentang TPB/SDGs yang responsif gender, inklusif dan transformative.
4. Menguatkan kapasitas para kader APM untuk melaksanakan peningkatan kapasitasPerempuan di kelompoknya masing – masing.
5. Memperkuat pemahaman peserta mengenai advokasi utama dari goal focus APM yang tergabung dalam konsorsium Permampu untuk mentransformasikan pengetahuan kepada multipihak, pemerintah, perempuan dan kelompok marginal di komunitasnya.

Dari tindak lanjut lokakarya tersebut, pada tanggal 21 September 2019, FKPAR Jambi mengadakan pertemuan reguler, diikuti oleh 29 orang berasal dari perwakilan kelompok/ CC sebagai anggota FKPAR dari Kabupaten Merangin, Bungo, Sarolangun dan staf APM. Pertemuan diawali dengan penyampaian hasil lokakarya tentang SDGs pada tanggal 16 – 18 September 2019 yang harus ditindaklanjuti oleh FKPAR.

Beberapa agenda yang dibahas dalam diskusi reguler ini adalah :

1. Evaluasi pengurusan Surat Keterangan Terdaftar/ SKT : 14 kelompok telah terdaftar di desa, ada 3 kepala desa yang agak alot dalam proses pengeluaran SKT dengan alasan bahwa kelompok CC merupakan bentukan dari APM, desa tidak memiliki kewajiban untuk membuat administrasi. Namun dengan kegigihan dan perjuangan Pengurus CC dan didampingi APM dengan cara menjelaskan dasar hukum, kepemilikan CC di desa, Fungsi CC di desa dan kewenangan APM akhirnya kepala desa memiliki perubahan pemahaman dan bersedia mengeluarkan SKT kelompok CC di desanya.
2. Membuat rencana kegiatan yang berkaitan dengan program stunting di desanya dengan menggunakan dana desa. Karena dari APM sudah mengadvokasi di level pemerintah daerah (Dinkes, DPMPD, DPKAD) agar menekan para kepala desa untuk benar – benar melakukan program pencegahan stunting dengan melibatkan kelompok perempuan.
3. Untuk kejar paket yang diusulkan melalui FKPAR, pada tahun ini sudah 11 orang yang masuk dapodik Diknas. Satu orang untuk kejar paket B, dan 10 orang kejar paket C. Ujian akan akan dilakukan pada Mei tahun 2020.
4. FKPAR harus melakukan pendekatan dan mengawal kinerja anggota dewan yang baru, Sedangkan untuk kepemimpinan tingkat desa harus mulai mencari strategi untuk memunculkan anggotanya, dan ke depan jumlah perempuan yang memimpin harus meningkat. Kalau sekarang anggota BPD perempuan rata–rata satu desa 1 orang, ke depan minimal 2 orang perdesa. Karena mimpi kita ingin memunculkan keterwakilan perempuan untuk memperju-angkan hak dasar perempuan pada level tingkat desa.





Dokumentasi Kegiatan FKPAR Jambi

FKPAR Bengkulu

Sejak masa pembentukannya hingga saat ini, FKPAR secara konsisten terlibat aktif dalam peran-peran strategis untuk mendukung pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sehingga dapat mengimbangi arus perubahan yang terjadi di masyarakat. Keberadaanya juga berkontribusi memperkuat nilai-nilai keberpihakan kepada kelompok masyarakat miskin dan perempuan yang selama ini menjadi korban ketidakadilan, untuk bersama-sama secara aktif dan kritis melakukan perubahan ke tatanan ekonomi, politik, dan budaya yang demokratis dan berpihak kepada perempuan.

Sangat disadari bahwa kapasitas FKPAR dalam menjalankan kerja-kerja jaringan dan advokasi tersebut tidak akan efektif dan berkelanjutan apabila pelaksanaannya hanya secara reaktif saja tanpa perencanaan yang sistematis. FKPAR membutuhkan kematangan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi (PME) yang berjalan baik, sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan, berdampak signifikan, dan menghasilkan pembelajaran berharga dari seluruh tahapan kerja-kerja FKPAR yang telah dijalankan.

Berdasarkan pada situasi tersebut, pada tanggal 27 November 2019 Cahaya Perempuan WCC memandang penting dilaksanakannya Rapat Tahunan FKPAR Provinsi Bengkulu tahun 2019. Ini adalah agenda rutin tahunan yang dilaksanakan Cahaya Perempuan WCC bersama FKPAR. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna Pemda Propinsi Bengkulu dengan melibatkan 228 orang anggota FKPAR Propinsi Bengkulu. Melalui kegiatan ini mereka mengetahui isi UU Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang

Usia minimal Perkawinan. Dalam pertemuan ini disampaikan perkembangan FKPAR tahun 2019 oleh pengurus FKPAR di 3 wilayah. Dibanding 2018 lalu yang masih ada sekitar 4 wilayah yang belum berkembang, maka di 2019 semua kelompok menunjukan ada perubahan berdasarkan jumlah anggota, CU, dukungan atau pengakuan Pemerintah lokal terhadap kelompok.



FKPAR Sumsel

Pengurus FKPAR Sumsel yang berasal dari Kota Palembang, Kabupaten OKI, Muara Enim, dan Banyuasin melakukan pertemuan/rapat rutin pada tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di Volum Café Palembang. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di tahun 2019. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memetik pembelajaran sekaligus me*review* capaian dan tantangan isu FKPAR Sumsel yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2019.

Saat ini, FKPAR Sumsel telah melakukan tindakan konkrit di lapangan berupa pendidikan dan kesadaran kritis bagi anggota, mengadvokasi kebijakan pemerintah, serta membangun hubungan dengan tokoh agama tokoh adat, tokoh masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan untuk advokasi aturan, nilai, dan norma yang mendiskriminasi perempuan. FKPAR Sumsel di tahun 2019 telah melakukan advokasi ke pemda (kota/kab dan desa) untuk memastikan tersedianya Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan perempuan, memfasilitasi kejar paket A, B, C untuk memastikan para perempuan memenuhi syarat untuk duduk dalam pengambil keputusan, advokasi pemenuhan hak-hak perempuan termasuk pemenuhan gizi, hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, khususnya di pedesaan dan miskin kota.



Pengurus FKPAR Sumsel Bergaya setelah Rapat Akhir Tahun 2019

Di penghujung tahun 2019, tepatnya tanggal 10 Desember 2019. Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumsel sebagai Forum dampingan Women's Crisis Centre (WCC) Palembang menggelar aksi kolektif dan pemeriksaan serta konsultasi kesehatan gratis. Kegiatan ini merupakan puncak Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019. Rangkaian Kegiatan dilakukan di Stadion Olahraga Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, diantaranya berupa:

- Pembagian *t-shirt* kampanye 16 HAKTP tahun 2019 ke masing-masing anggota kelompok dampingan WCC Palembang
- Penyebaran alat kampanye ke pengunjung yang datang ke Stadion Olahraga Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang.
- Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis dari "Rumah Ibu" untuk kelompok dampingan dan personil WCC Palembang.
- Menggelar bazar hasil olahan makanan dan kerajinan tangan dari masing-masing kelompok dampingan dan
- Pentas seni terkait anti kekerasan terhadap perempuan dari anggota kelompok dampingan.

Tujuan aksi kolektif ini untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan partisipasi publik untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Adapun tema kampanye tahun ini adalah 'Gerak Bersama Mengakhiri Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Menggalang Dukungan Publik untuk Mendorong Pemerintah Memenuhi Hak-Hak Perempuan, khususnya Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan" (Penulis: Yesi Ariani/WCC Palembang)



Pemeriksaan dan Konsultasi Kesehatan bagi pengurus dan anggota FKPAR Sumsel

FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS)



FMS Aceh

Oleh Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati

Forum Multi Stakeholder dan Femokrat melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung pelaskanaan Tujuan Berkelanjutan (TPB/SDGs Aceh yang responsif gender, inklusif dan transformatif diantaranya melalui kegiatan diskusi – diskusi reguler tentang HKSR, pemanfaatan OSSL, kerjasama untuk penanganan malnutrisi dan stunting, percepatan Kabupaten/Kota dan Gampong layak anak yang berpengaruh pada Tujuan 3. Manajemen usaha dan upaya membangun kemandirian ekonomi perempuan yang berdampak pada Tujuan 1, serta penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan di desa dan rangkaian kegiatan perayaan 16 HAKTP yang mengusung tema " Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Perkawinan Anak" diharapkan mampu berdampak pada tujuan 3 dan 5.

Prinsip kolaborasi sebagai salah satu esensi pelaksanaan TPB/SDGs dilaksanakan melalui kegiatan yang diinisiasi bersama oleh pemerintah, jaringan LSM, perguruan tinggi dan akademisi, filantropi/ swasta, Tokoh agama dan tokoh adat serta media yang merupakan peserta FMS. Pada priode ini aktivitas yang dilaksanakan secara sinergis yaitu:

- Rapat penyusunan matriks SDGS. Flower Aceh sebagai koordinator mitra non-pemerintah leading untuk memfasilitasi proses pengumpulan matriks dari sisi non pemerintah di provinsi Aceh dan 3 kabupaten/kota lainnya melalui fasilitasi pertemuan FMS tentang penyusunan matriks SDGs.
- Konsultasi public RAD SDGs Kota Banda Aceh yang difasilitasi oleh Bappeda Kota Banda Aceh melibatkan Flower Aceh untuk mempresentasikan pengalaman penyusunan RAD SDGs di Kota Banda Aceh.
- Pendidikan politik untuk komunitas kerjasama Flower Aceh dengan DP3AP2KB Kota Banda Aceh dengan menggunakan dana APBK
- Pengembangan; persiapan, pencanangan dan pelaksanaan Gampong layak anak di 3 desa dampingan Flower Aceh di Kota Banda Aceh: desa Alue Deah Teungoh, Blang Oi dan Punge Jurong dan 2 desa dampingan Flower Aceh di Aceh Utara: desa Mns. Redeap Lhoksukon dan Paloh Gadeng.
- Berbagai bentuk kegiatan peningkatan kapasitas perempuan di beberapa desa dampingan Flower Aceh tentang HKSR, hak perempuan, dan penanganan KTPA yang diselenggarakan oleh desa dengan melibatkan penggunakan dana desa dan narasumber dari instansi pemerintahan, LSM dan akademisi.
- EduAksi bersama DPPPA, Puspa Aceh dan lintas sektor lainnya dalam bentuk penyampaian materi tentang penanganan KTPA dan penghapusan perkawinan anak melalui upacara bendera di sekolah-sekolah.
- Tergabung dalam tim inti advokasi pemenuhan hak anak, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) Aceh yang beranggotakan 10 orang tim inti perwakilan dari multi stakeholder yang terdiri dari pemerintah; DPPPAA, P2TP2A Aceh, dan KPPA Aceh. Perguruan tinggi diwakili oleh; PSG Unsyiah, Pusat Studi Gender dan Anak UIN Arraniri, serta elemen sipil/LSM; Flower Aceh, KKTGA, lembaga anak KAPHA dan Balai Syura. Aktivitas tim advokasi ini difasilitasi oleh KPPA dan DPPPA Aceh.
- kerjasama atara Flower Aceh dengan Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah UIN Arraniri dalam pelaksanaan magang 30 mahasiswa di Flower Aceh selama 3 bulan secara bergantian. Tujuan magang selain menjadi sarana belajar mahasiswa tentang kerja-kerja Flowr Aceh terkait pengorganisasian dan pemenuhan hak perempuan termasuk HKSR dan kepemimpinan perempuan, juga menjadi sarana sharing knowledge antar konsep dan teori yang dimiliki mahasiswa dan kedua fakultas tsb dengan pengalaman lapang yang dimiliki oleh Flower Aceh.
- Flower Aceh menjadi mitra Strategis pada kegiatan visitasi perdana akriditasi Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Arraniri.
- Flower Aceh mendapatkan Sertifikat penghargaan atas partisipasi dalam evaluasi Badan Publik tahun 2019 oleh Komisi Informasi Aceh.



FMS Pesada

Diskusi reguler FMS di semester kedua terlaksana di 4 kabupaten yakni Pakpak Bharat, Dairi, Langkat & Nias Barat dengan pelibatan pengurus FMS dalam kegiatan-kegiatan. FMS Kabupaten Nias Barat melaksanakan rapat mempersiapkan jadwal & kegiatan untuk sosialisasi mengenai pelaksanaan adat yang telah disederhanakan ke tingkat kecamatan di kabupaten Nias Barat. Beberapa kesepakatan diantaranya : Jujuran/ *bowo* sepakat untuk disederhanakan guna untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan mengurangi beban keluarga terutama pihak laki-laki, pemberian jujuran/*bowo* pernikahan didasarkan pada *bosi* atau status keluarga perempuan, penyederhanaan dilakukan melalui volume *bowo* sementara nama dan nilainya tetap di sebutkan. Kesepakatan ini akan dilakukan sosialisasi melalui rayon yang dibagi 3 rayon di kabupaten Nias dan kerjasama dengan pemerintah dan LBN Nias, batas usia menikah 20 tahun, posisi yang setara antara anak perempuan dan laki-laki

termasuk dalam pembagian warisan dan biaya pesta nikah, membangun kesetaraan antara istri dan suami dalam keluarga unntuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, nasehat/*Fotu* Nias yang kurang pas pada era sekarang dihilangkan, contohnya " Na'obozi/ kalau anda memukul dll., sebutan adat kepada pengantin perempuan yaitu BOLIGANA'A/ yang dibeli melalui emas, perak dan uang dan OWOLIWA/ sejenis barang yang dibeli tidak digunakan dan diganti dengan UMONO/ sebutan bagi keluarga bagi perempuan yang sudah menikah. Sosialisasi ini penting agar semua masyarakat umumnya dan secara khusus tokoh adat sebagai pelaku dalam pelaksanaan adat bersama-sama memahami dan menerapkan adat yang telah disepakati bersama untuk kesetaraan perempuan dan laki-laki dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Juga dilakukan peningkatan kapasitas Forum Multi Stakeholder Kabupaten Langkat & Nias Barat **mengenai** pemahaman tentang stunting. Dengan demikian diharapkan pelibatan laki-laki dalam mencegah terjadinya stunting dan melakukan advokasi pemenuhan HKSR.

FMS terlibat dan aktif menjadi fasilitator diskusi HKSR bagi remaja desa/gereja/mesjid, penyadaran gender untuk kaum laki-laki/suami anggota CU, terlibat audiensi di pemerintahan untuk mengevaluasi MoU OSS&L untuk pemenuhan HKSR & Gizi Perempuan di Kabupaten Pakpak Bharat, Dairi & Nias Barat. FMS juga berperan saat ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhubungan dengan nilai setempat, untuk menekan keputusan-keputusan keluarga besar atau masyarakat yang tidak mekihak kepada hak-hak perempuan. Antara lain intervensi kasus perdamaian kekerasan seksual oleh tokoh masyarakat, serta kegiatan lainnya di wilayah dampingan Pesada. Dengan adanya FMS ini menjadi mitra Pesada untuk menjangkau lebih banyak stake holder agar bersama-sama memperjuangkan persoalan-persoalan perempuan khususnya mengenai HKSR.



Foto FMS - Evaluasi pelaksanaan OSS&L Puskesmas Batang Beruh Kabupaten Dairi

Evaluasi pelaksanaan OSS&L dilaksanakan di Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat & Nias Barat. Dari hasil pertemuan ini dihasilkan SOP pengelolan OSS&L dan perbaikan MoU serta RTL selanjutnya adalah : Pemeriksaan IVA dilakukan di desa yang jauh dari Faskes, penyuluhan HKSR di sekolah dan di desa/ Posyandu kerja sama dengan Pesada, konseling dan pelayanan remaja di Puskesmas, sosialisasi OSS&L di masyarakat melalui berbagai media (spanduk, baliho, brosur, media socsial), kerjasama dengan sekolah (UKS, BP) untuk OSS&L remaja & Replikasi OSS&L oleh Dinas Kesehatan untuk setiap Puskesmas, menyediakan ruangan khusus untuk penerima layanan OSSL di setiap Puskesmas, kelengkapan dan ketersediaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan di Puskesmas sesuai dengan standar yang berlaku.

FMS Sumatera Barat

Pertemuan FMS tingkat provinsi terlaksana pada 9 September 2019 dalam rangka Hari Ulang Tahun LP2M yang ke-24 di Kantor LP2M, Padang. Hari ulang tahun menjadi momen penting bagi LP2M untuk merefleksikan diri sebagai sebuah lembaga perempuan yang memperjuangkan keadilan gender sejak 1995. Oleh karena itu, LP2M menyelenggarakan pertemuan FMS tingkat provinsi dengan tema "Implementasi *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* (ASB-SBK) dalam Pembangunan Sumatera Barat" dan melibatkan 32 orang peserta (18P dan 14L) yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Muhammadiyah, NU, LKAAM, Komnas HAM, Ombudsman, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Dinas Kehutanan, CO/kader lokal, dan LSM di Sumatera Barat. Falsafah ASB-SBK mengandung nilai-nilai kehidupan yang mendasari masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupan bersosial. Selain itu, ASB-SBK juga menjadi salah satu Misi pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang perlu dicapai. Di dalam falsafah ini juga dikenal istilah *Tigo Tungku Sajarangan* yang dalam perkembangannya istilah ini bermakna tiga unsur yang saling bersinergi, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah. *Bundo Kanduang* yang notabenya adalah perempuan yang dihormati sebagai pemilik tanah ulayat memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pengambilan keputusan di nagari. Namun pada kenyataannya, saat ini perempuan jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pertemuan FMS ini, LP2M mengajak para pihak untuk bersama menyamakan persepsi dan menerapkan falsafah ASB-SBK di dalam pembangunan Sumatera Barat.

Aksi Bersama dalam rangka Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2019 dengan tema "STOP Perkawinan Usia Anak". Kegiatan ini dihadiri oleh 65 orang peserta (34P dan 31L) dari FMS tingkat provinsi dan 3 kab./kota (Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Padang). Pertemuan ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama para pihak dalam mengimplementasikan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai salah satu upaya pencegahan perkawinan usia anak. Anggota FMS yang hadir diminta untuk menandatangani komitmen bersama agar mempromosikan UU No 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan 19 tahun dan mengembangkan aturan & program di tingkat nagari untuk mencegah perkawinan usia anak.

FMS Riau



Pelatihan Musrenbang dan Anggaran Berperspektif Gender untuk Kepala desa, BPD/ BPKep/ BPK

Artikel Forum Multi Stakeholder (FMS) propinsi Riau pada periode ini akan diwakili oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh FMS, Forum tokoh adat, Pelatihan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dari 10 Puskesmas di Kabupaten Kampar dan Pelatihan penggunaan buku Pedoman Pendidikan Ketubuhan bagi Orangtua yang diikuti oleh para suami Keluarga Peduli HKSR. Pada bulan Oktober FMS mendapatkan pelatihan Musrenbang untuk meningkatkan pemahaman Pemerintahan desa dalam menyusun anggaran berperspektif gender dalam penggunaan dana desa. Pelatihan Musrenbang dan RPJM yang responsif gender ini dihadiri oleh kepala desa, BPD, dan LPM Kota Pekanbaru, Kab. Kampar, dan Kab. Rokan Hilir yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Oktober 2019 di Hotel Mulya, Bagansiapiapi. Pelatihan ini dimulai dengan pembukaan pelatihan oleh Dinas PMD Kab, Rokan Hilir. Kemudian pemaparan narasumber tentang BUMDes oleh Dinas PMS Kab. Rohil. Kemudian menyamakan persepsi tentang responsive gender, program responsive gender, tantangan dan hambatannya, dan model penganggaran responsive gender.

Kegiatan lain dilakukan oleh Forum Tokoh Adat ,Agama dan Masyarakat Riau yaitu pertemuan untuk penguatan dukungan dalam pemenuhan HKSR perempuan dan pencegahan perkawinan anak pada tanggal 5 Juli 2019 di Desa Pulau Payung, Kabupaten Kampar. Pertemuan dihadiri oleh 14 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Didalam diskusi tersebut semua tokoh yang hadir setuju untuk meningkatkan usia perkawinan menjadi 19 tahun dengan catatan tidak ada kasus kehamilan sebelum nikah. Menurut tokoh adat, agama dan masyarakat yang hadir, jika seorang gadis sudah hamil sebelum nikah maka harus segera dinikahkan, jika tidak dinikahkan akan berdosa semuanya. Untuk penggunaan alat kontrasepsi oleh perempuan semua yang hadir setuju, sedangkan penggunaan alat kontrasepsi untuk laki-laki sebagian setuju untuk memakai kondom sedangkan sebagian mengatakan ikut saja pendapat bapak-bapak yang lain. Diskusi Forum Tokoh Adat berlangsung dinamis dan sudah cair karena pesertanya sudah pernah mengikuti pelatihan penyadaran gender dan HKSR serta sebagian sudah mengikuti kegiatan Keluarga Peduli HKSR.

Kegiatan lainnya adalah **Lokalatih Penggunaan Buku Pegangan Orang Tua Kepada Suami – Pendidikan Ketubuhan Untuk Anak yang dilaksanakan di Pekanbaru 28 - 29 Desember 2019 dengan tema *"Keluarga & Rumah Tangga – Fondasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi"*.** Peserta pelatihan ini berjumlah 25 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. **Tujuan umum** yang ingin dicapai dalam Penggunaan Buku Pegangan Bagi Orang Tua **khususnya** kepada suami adalah membangun pemahaman yang sama tentang pentingnya pendidikan seks (pendidikan ketubuhan) dalam keluarga sehingga suami termotivasi untuk memberikan informasi seksualitas dan reproduksi dalam rangka pemenuhan Hak Kesehatan seksual reproduksi serta peningkatan status gizi perempuan dan anak-anak kepada keluarga. Sedangkan **tujuan khusus** yang ingin dicapai dalam lokalatih ini adalah: Membangun dukungan agar Pendidikan Sex dilaksanakan sebagai sebuah gerakan pendidikan dalam keluarga serta menguatkan peran suami sebagai pihak yang dapat menjadi penggerak masyarakat dalam mendukung dimulainya Pendidikan Sex di dalam keluarga. Peserta mengikuti Lokalatih dengan semangat karena semua sudah pernah mengikuti pelatihan penyadaran gender dan HKSR sehingga diskusi tentang bagaimana memberikan pendidikan seks atau ketubuhan bagi anak-anak menjadi sangat menarik untuk peserta. Peserta sudah tidak canggung lagi ketika diminta untuk menggambarkan organ reproduksi laki-laki dan perempuan dan mereka bisa menjelaskan dengan bahasa yang baik dan tidak merasa jorok lagi untuk diskusi tentang kesehatan reproduksi dan organ reproduksi.

FMS Jambi

Untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak, FMS provinsi Jambi selama ini ikut berperan aktif mendampingi APM dan FKPAR. Pada tanggal 3 Desember 2019 Aliansi Perempuan Merangin bersama FMS dan FKPAR juga mengadakan diskusi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin tentang adanya kerjasama untuk issu kesehatan reproduksi remaja. Karena kerja – kerja DPPKB dan APM banyak yang sudah dilakukan bersama, maka ke depan akan mengadakan MOU yang fokus untuk pencegahan perkawinan anak dan Informasi Kesehatan reproduksi. APM akan menyiapkan drafnya dan didiskusikan bersama setelahnya.

Audiensi ke DPRD Kabupaten Merangin untuk mendorong adanya kebijakan anggaran untuk pendampingan kasus dan adanya produk kebijakan di bidang hukum tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan pada periode ini.

Kebijakan –Kebijakan yang dicapai pada semester kedua tahun 2019 ini adalah:

1. MOU antara APM dan Dinkes Kabupaten Sarolangun tentang peningkatan kesehatan reproduksi perempuan usia subur dan remaja

2. Surat edaran Bupati Merangin no 800/504/PP.2/DSOSPPPA/2019 tentang Penyusunan anggaran yang responsif gender
3. Perpanjangan MOU antara APM-Puskesmas Meranti tentang Program Kesehatan Peduli Remaja
4. Perpanjangan MOU antara APM-SMA N 5 Merangin tentang Penguatan Issu Kespro remaja sekolah dan Penguatan Kader PIK-R
5. MOU APM-Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sarolangun tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sarolangun
6. Draf MOU APM- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin tentang pendidikan kespro remaja dan Pencegahan perkawinan usia anak
7. Usulan adanya Perda tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Merangin







Foto Kegiatan Upaya FMS untuk Hadirkan Kebijakan yang Berpihak pada Perempuan

FMS Bengkulu

Pertemuan Forum Multi Stakeholder (FMS) Kota Bengkulu dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 bertempat di Ruang pertemuan Cahaya Perempuan WCC. Pertemuan ini dihadiri 12 orang anggota FMS yang terdiri dari 5 laki-laki dan 7 perempuan. Tujuan dilakukan adalah untuk melakukan pembahasan mengenai isi Rancangan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bengkulu, dimana Rancangan Peraturan Walikota ini adalah sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan Forum Multi Stakeholder sebelumnya dan tindak anjut dari Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dengan adanya Peraturan Walikota tentang Pencegahan Perkawinan Anak dapat menekan angka Perkawinan Usia anak yang masih banyak terjadi di Kota Bengkulu.

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas P3APP&KB Kota Bengkulu yaitu Bpk Romadan, beliau membuka acara sekaligus ikut aktif dalam kegiatan. Dalam menyusun Rancangan peraturan Walikota ini yang menjadi leading sektor adalah Dinas P3APP&KB Kota Bengkulu. Perkembangan Rancangan Peraturan ini telah masuk ke bagian Hukum Setda Kota Bengkulu namun dengan pertemuan ini yang menghadirkan beberapa perwakilan anggota FMS diharapkan adanya masukan atau perbaikan dari isi rancangan peraturan ini. Dari pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan antar anggota FMS yaitu : 1). Setelah di sahkannya peraturan walikota tentang Pencegahan Perkawinan Anak diharapkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah memasukkannya dalam Rencana Kerja masing-masing OPD. 2). Adanya masukan dari anggota FMS mengenai isi dari rancangan Peraturan Walikota Baik dari segi penulisan serta isi dari pasal perpasal. 3). Setelah disahkan Dinas P3APP&KB akan menidaklanjuti dengan membuat Rencana Aksi Daerah Tentang Peraturan Walikota tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. 4). Anggota FMS bersepakat untuk terus mengawal sejauh mana implementasi dari PERWAL ini jika telah disahkan dimulai dengan aktif mensosialisasikan ke masyarakat. 5). Diharapkan adanya surat edaran mengenai Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang dikeluarkan oleh walikota & diikuti oleh semua Kelurahan yang ada di Kota Bengkulu.

Pertemuan Forum Multi Stakeholder (FMS) Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 bertempat di Aula Setda Kab. Rejang Lebong. Pertemuan ini dihadiri 12 orang anggota FMS yang terdiri dari 6 laki-laki & 6 perempuan. Tujuan dilakukan pertemuan ini adalah mendorong lahirnya Peraturan Bupati Kab. Rejang Lebong tentang Pencegahan Perkawinan di Usia anak, karena masih sering terjadi kasus perkawinan anak yang terjadi di

Kab. Rejang Lebong serta tindak lanjut dari adanya Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh staf Ahli Setda Ka. Rejang Lebomg yaitu Bpk Edi Ansori & beliau terlibat aktif dalam kegiatan ini. Adapun hasil dari pertemuan ini menyepakati beberapa hal dari anggota FMS yang hadir yaitu : 1). MUI akan melakukan Goes to School di 34 titik sekolah untuk menkampanyekan stop kawin anak. 2). Bupati Rejang Lebong belum bersepakat untuk membuat Peraturan Bupati mengenai Pencegahan Perkawinan Anak namun telah ada draft Surat Edaran Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Anak lintas sektor bersama Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong. 3). Anggota FMS bersepakat akan tetap melakukan advokasi agar tahun 2020 adanya Peraturan Bupati karena ini dianggap cara paling strategis untuk pencegahan Perkawinan Anak bukan hanya sekedar Surat Edaran.

Pertemuan Forum Multi Stakeholder (FMS) Kabupaten Seluma dilaksanakan pada hari selasa, 20 Agustus 2019 bertempat di Aula BAPPEDA Kab. Seluma. Kegiatan ini dihadiri 12 orang anggota FMS terdiri dari 7 laki-laki & 5 perempuan. Dalam kegiatan bertujuan untuk membuat surat edaran Bupati Kab. Seluma untuk Pencegahan Perkawinan di Usia Anak Kab. Seluma sebagai dari Implementasi dari Peraturab Bupati No 27 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Berbeda dengan Kota Bengkulu dan Kab. Rejang Lebong, Kab. Seluma tahun 2018 telah terlebih dahulu mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan di Usia Anak.



Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Bpk Asisten III yaitu Bpk Marhalidianto beliau membuka acara sekaligus ikut aktif dalam kegiatan ini. Adapun hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut: 1). Dalam membuat Surat Edaran harus mengundang atau melibatkan PMD agar lebih mempercepat dalam mengkomunikasikan ke level pemerintahan desa. 2). Perlu adanya revisi dari surat edaran sebelumnya karena menurut bagian hukum isi muatan dalam surat edaran sebelumnya kurang kuat.

FMS Sumatera Selatan

Pertemuan Forum Multi Stakeholder (FMS) Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan dan Anak pada semester II tahun 2019, dilaksanakan di Kab. OKI dan Kabupaten Muaraenim. Di Kabupaten OKI, pertemuan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019 bertempat di Ruang Rapat PKK Kabupaten OKI. Jumlah peserta 24 orang terdiri dari 20 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Pertemuan FMS di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di Kantor Camat Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Jumlah peserta 27 orang, terdiri dari 20 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Topik pembahasan di 2 kabupaten ini mengenai masalah, penyebab dan dampak perkawinan anak sekaligus *update* mengenai Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Perkawinan Anak terutama terkait putusan MK yang mengabulkan permohonan judicial review uji materi tentang peningkatan usia perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penegasan bahwa pencegahan perkawinan anak mendukung 8 indikator pada SDGs (indicator 1,2,3,4,5,8,10 dan 16).

Semua peserta berbagi pengalaman dan data dari masing-masing institusi/lembaga mereka terkait upaya pencegahan dan penghentian perkawinan anak di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Selain itu, disusun strategi advokasi pencegahan dan penghentian perkawinan anak dan pembagian peran antar mitra dalam advokasi pencegahan dan penghentian perkawinan anak. Sehubungan dengan focus pemerintah saat ini adalah pembangunan sumber daya manusia, maka tidak sulit berbagi peran antar institusi yang menjadi anggota FMS karena pencegahan perkawinan anak selaras dengan focus pemerintah. Hal lainnya yang sangat berkaitan erat dan dibahas dalam pertemuan FMS semester ini adalah pencegahan "stunting". Saat ini, Kabupaten OKI menjadi salah satu kabupaten yang memprioritaskan penurunan "stunting" dan pencegahan perkawinan anak. (Penulis: Yesi Ariani/WCC Palembang)



Pertemuan Forum Multi Stakeholder (FMS) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

FORUM FEMOKRAT



FEMOKRAT Sumatera Utara

Pada semester 2 terlaksana pertemuan reguler Forum Femokrat di Kabupaten Pakpak Bharat & Nias Barat. Pertemuan di Pakpak Bharat mendiskusikan gugus tugas kepengurusan, memfinalisasi keanggotaan dan struktur guna pembuatan SK Femokrat yang diharapkan akan dikeluarkan oleh Bupati Pakpak Bharat. Hasil audensi dengan Tapem (Tata pemerintahan) disarankan Femokrat berbadan hukum dan dilajutkan pengurusan SKT agar mendapat pengakuan dan dukungan untuk kegiatan-kegiatan Femokrat Pakpak Bharat.

Di Nias Barat, pertemuan Femokrat membahas tema" Mendorong Kepemimpinan Perempuan Yang Peka Gender Guna Pemenuhan Hak-hak Perempuan & Penganggaran yang Sensitif Gender", dilaksanakan tanggal 19 Desember 2019, dihadiri oleh 23 orang terdiri dari 19 perempuan, 4 laki-laki yang berasal Instansi Pemerintah/OPD dan juga pemberi layanan. Melalui pertemuan ini menghasilkan usulan dan rencana tindaklanjut forum kedepan yaitu : Pembentukan P2TP2A Nias Barat,. Hal ini mendesak mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Nias Barat. Ini adalah salah satu bentuk komitmen femokrat untuk mendukung upaya pemenuhan HKSR dan hak perempuan melalui perannya di pemerintah.



Foto Pemokrat Pakpak Bharat

FEMOKRAT Sumatera Barat

Femokrat Sumatera Barat aktif dalam mendiskusikan isu terkait HKSR dalam semester ini. Pertemuan Femokrat tingkat Provinsi Sumatera Barat terlaksana pada 31 Agustus 2019 di Hotel Rangkayo Basa, Padang. Pertemuan Femokrat dilaksanakan dalam rangka merespon hasil Pemilu 2019 yang masih minim akan keterwakilan perempuan. Sehubungan dengan kondisi tersebut, LP2M menyelenggarakan Pertemuan Perempuan Birokrat (Femokrat) tingkat provinsi dengan tema "Peran Legislatif dan Eksekutif dalam Mendorong Kebijakan yang Peka Gender-Inklusi dan Kepemimpinan Perempuan". Melalui pertemuan ini, diharapkan anggota legislatif perempuan terpilih mampu mendorong lahirnya kebijakan yang peka gender-inklusi dan membuat program untuk mendorong kepemimpinan perempuan. Kegiatan ini menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Anggota DPR RI (Nevy Zuairina), Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sitti Izzati Aziz), dan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/DPPA Provinsi Sumatera Barat (Ernalis Bahar). Moderator Diskusi pada kegiatan ini adalah Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Fitriyanti. Kegiatan ini melibatkan 56 peserta (49P dan 7L) yang terdiri dari perempuan birokrat, media, dan FMS dari tiga kab./kota (Padang, Padang Pariaman, dan Tanah Datar).



Foto Sesi Diskusi bersama Narasumber pada Pertemuan Femokrat Tingkat Provinsi

FEMOKRAT Jambi

Bertempat di aula kantor Kesbangpol Kabupaten Merangin pada tanggal 31 Agustus 2019, diikuti oleh 25 perempuan pejabat publik yang memiliki jabatan strategis di masing – masing OPD, dari Kabupaten Merangin, Bungo dan Sarolangun. Ketiga kabupaten ini menjadi wilayah kerja atau jangkauan APM dalam program HKSR ini. Fasilitator dalam kegiatan ini adalah Pengurus Konsorsium Permampu, Helfi Rahmawati. Narasumber pemantik ibu Rika dari Dinas Pemberdayaan Perempuan propinsi Jambi dengan tema "Urgensi Pemenuhan Hak Dasar Perempuan

Dan Anak di propinsi Jambi" dan materi Persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan pembangunan gender dalam RAD SDGs provinsi Jambi oleh bapak Edi Wijaya.

Diskusi antara APM dan Femokrat sudah mulai dilakukan sejak tahun 2016 untuk Merangin, tahun 2018 di Bungo dan April tahun 2019 di Sarolangun. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan lanjutan. Dari pertemuan ini membuka pemahaman mereka bahwa teryata masih banyak kasus - kasus kerasan seksual, kekerasan terhadap anak, gizi buruk AKI/AKB yang tinggi (meski di Jambi menurun), kematian bayi dan balita, perkawinan di usia anak. Stunting juga merupakan persoalan yang cukup besar, meski harapan hidup yang meningkat, namun masih ada persoalan dimana – mana. Sementara itu keterwakilan perempuan di Jambi masih minim; hanya1 di Merangin, 5 untuk Bungo, dan 3 untuk Sarolangun.

Arena ini digunakan untuk melakukan konsolidasi dalam memperkuat jaringan advokasi perempuan pejabat publik di 3 Kabupaten wilayah kerja APM Jambi, guna mendukung upaya pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan, melakukan refleksi tentang kondisi perempuan terkait dengan isu kemiskinan, kesehatan reproduksi dan seksual (KSR) serta kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan di tingkat provinsi dan 3 Kabupaten wilayah kerja APM Jambi, serta pengalaman penanganan yang sudah dilakukan di masing – masing Kabupaten .

Dari penyampaian narasumber dan diskusi partisipatif oleh peserta ditemukan adanya persoalan – persoalan perempuan dan anak di masing – masing Kabupaten. Selanjutnya femokrat menyusun rencana tindak lanjut dari masing – masing kabupaten yaitu untuk Bungo : Advokasi anggaran, Sarolangun : Aktifnya OPD dalam melakukan PUG dan Pemahaman tentang Gender, sementara untuk Merangin : Koordinasi dan audiensi dengan anggota Dewan baru terkait masalah anggaran dan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, pada tanggal 14 November 2019, perempuan pejabat publik kabupaten Sarolangun mengadakan pertemuan reguler. Dilaksanakan di aula kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun. Diikuti oleh 19 peserta terdiri dari 18 perempuan dan 1 orang laki – laki (Kepala Dinas). Fasilitator mengajak peserta membahas HKSR yang dikaitkan dengan kasus meningglanya Waleha / seorang perempuan korban tindak kekerasan dari berbagai unsure; dengan tujuan agar para perempuan pejabat publik mengetahui arah advokasi yang akan dilakukan secara bersama. Diskusi ini dilanjutkan dengan membahas rencana - rencana kerja Perempuan Pejabat Publik Kabupaten Sarolangun diantaranya: 1).Mengumpulkan data perkawinan usia anak; 2). Mengawal Perempuan Parlemen untuk menyamakan persepsi; 3). Koordinasi dengan Kabag Hukum; 4. Hearing Ke DPRD tentang Perda perlindungan Perempuan yang sudah masuk ke Prolegda; dan 5) Audensi dengan Bupati Sarolangun hasil Hearing ke DPRD.







Foto Kegiatan Pertemuan Perempuan Femokrat Provinsi Jambi

FEMOKRAT Lampung



Dalam rangka perayaan Hari Ibu, Pemerintah Propinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas inisiatif Ibu Wakil Gubernur, menyelenggarakan Saresehan Femokrat bertema penguatan peran dan kontribusi perempuan birokrat Pemerintah Propinsi Lampung, di Balai Keratun, Jumat (27/12). Pertemuan Femokrat tersebut merupakan tindaklanjut dari proses pertemuan Femokrat sebelumnya pada September 2019 yang diinisiasi oleh DAMAR.

Ibu Wakil Gubernur Chusnunia Halim bertekad akan membentuk sebuah forum perempuan dalam birokrasi di lingkungan Pemerintah propinsi Lampung. Menurutnya forum tersebut perlu sebagai wadah komitmen untuk berjuang di dunia birokrasi. Hal ini dapat mendorong keputusan yang adil untuk perempuan dalam birokrat dalam upaya penguatan peran dan kontribusi perempuan dalam birokrat.

Ibu Chusnunia Chalim juga mendorong perempuan untuk terus berperan dan kontribusi secara aktif di birokrasi pemerintahan. Dan menilai kedudukan perempuan saat ini masih termajinalkan dalam birokrasi maupun lembaga-lembaga swasta.

Dalam acara sarasehan yang juga menghadirkan Anggota DPD RI Dapil Lampung Jihan Nurlela, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Diah Srikanti , Akademisi Universitas Lampung, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, Ibu Wakil Gubernur dihadapan para pejabat pratama dan pengawas perempuan dari lingkungan Pemprov Lampung, serta Pejabat perempuan perwakilan dari 15 kabupaten/Kota; mendorong perempuan meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri bahwa ia mampu bekerja dan berprestasi jika diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tidak hanya itu, dari sisi eksternalnya diharapkan Pemerintah menyediakan aturan dan fasilitas yang lebih ramah terhadap perempuan. Ibu Wagub mengusulkan ke Bappeda agar ada tempat pengasuhan penitipan anak gratis sehingga perempuan yang bekerja di Provinsi Lampung bisa terkurangi bebannya, serta ingin membuat grup atau jejaring untuk memberikan penguatan dan perubahan untuk perempuan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Diah Srikanti berbagi pengalaman terkait persoalan tentang beban-beban yang di rasakan oleh kaum perempuan dalam bekerja. Salah satunya memikirkan soal pekerjaan dan persoalan keluarga. Senator Lampung Jihan Nurlela pada kesempatan itu mengatakan dirinya akan membawa aspirasi kaum perempuan untuk menambah peluang perempuan di dunia birokrasi. “Tidak hanya berpeluang 30% saja” katanya menutup diskusi tsb.

FORUM PEREMPUAN MUDA (FPM)



FPM Sumatera Barat

Forum Perempuan Muda (FPM) Sumatera Barat terlibat aktif dalam beberapa kegiatan kampanye isu-isu terkait HKSR pada semester ini. Dalam rangka Perayaan Hari Anak Nasional yang dirayakan pada 28 Juli 2019, anggota FPM 3 kab./kota bersama laki-laki menampilkan Kesenian *Randai* yang menceritakan tentang dampak perkawinan anak. Kesenian *Randai* menjadi salah satu metode bagi perempuan dan laki-laki muda di Kab. Tanah Datar untuk mengkampanyekan isu-isu HKSR kepada remaja dan masyarakat. Dalam aksi bersama ini, anggota FPM juga ikut memberikan komitmen untuk mengakhiri perkawinan usia anak dalam bentuk penandatanganan bersama di kain putih dan berfoto bersama dengan membawa spanduk "STOP Pernikahan Usia Anak".



Foto Persembahan Randai dari Kelompok Muda Dampingan LP2M

Pertemuan FPM tingkat provinsi kembali dilakukan pada 6 Oktober 2019 di Kantor LP2M untuk mempersiapkan langkah-langkah fasilitasi pertemuan Perempuan Muda tingkat kab./kota. Kegiatan ini diikuti oleh empat orang CO Perempuan Muda yang telah mengikuti Kegiatan Pertemuan Perempuan Muda tingkat Sumatera di Lampung September 2019 lalu. Setelah pertemuan ini, setiap CO perempuan muda bersama staf lapangan LP2M akan memfasilitasi pertemuan kelompok perempuan muda di tiga kab./kota (Padang, Padang Pariaman, dan Tanah Datar).

Forum Perempuan Muda (FPM) kemudian melakukan pertemuan di tingkat kab./kota pada Oktober 2019. Agenda pertemuan FPM membahas tentang perubahan remaja pada masa pubertas dan cara menyikapi perubahan dengan tepat. Pertemuan FPM Tingkat Kab. Tanah Datar terlaksana pada tanggal 13 Oktober 2019 di Nagari Lubuk Jantan Kec. Lintau Buo Utara yang dihadiri oleh 18 orang perempuan muda. Pertemuan FPM Tingkat Kab. Padang Pariaman terlaksana pada tanggal 20 Oktober 2019 di Nagari Sungai Abang Kec. Lubuk Alung, sedangkan Pertemuan FPM Tingkat Kota Padang terlaksana pada tanggal 20 Oktober 2019 di Kelurahan Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan dengan peserta di masing-masing kab./kota sebanyak 19 orang.



Foto Suasana Nonton Bareng Video tentang Pubertas pada Pertemuan Forum Perempuan Muda di Kab. Tanah Datar





Foto Proses Diskusi pada Pertemuan Forum Perempuan Muda di Kab. Padang Pariaman (kiri) dan Kota Padang (kanan)

FPM Jambi

Forum Perempuan muda dampingan APM, saat ini selain berasal dari 7 kelompok perempuan muda di 7 desa (178 orang), juga berasal dari 18 sekolah SLTP/SLTA Sederajat (150 0rg) di 3 Kabupaten termasuk pengurus forum anak daerah Bungo dan Merangin, serta Upik Merangin.

Selain diskusi reguler tentang kespro dan nutrisi, pada semester ini beberapa agenda yang di bahas adalah Sosialisasi UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama pada pasal 7 tentang batas minimal usia perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki - laki; menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki – laki.

Forum Perempuan muda juga mulai melakukan upaya untuk pencegahan perkawinan usia anak.Tentu diawali dari diri mereka sendiri, baru mengkampanyekan untuk menyebarluaskan kepada orang lain. Media yang digunakan untuk mengkampanyekan adalah melalui forum – forum yang mereka ikuti, misal kelompok perempuan muda dampingan APM di 7 desa, Karang Taruna, Pusat Informasi dan konsultsi Remaja/PIK-R di 18 sekolah SLTP/SLTA sederjaat, kelompok tani dan menggunakan media sosial seperti facebook, instagram dan lain – lain.

Dalam periode ini mereka bersama APM terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan perayaan hari kesehatan seksual pada tanggal 14 September 2019 dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilakukan dalam rentang waktu tanggal 25 November – 10 Desember 2019. Seperti Dialog publik, nonton bareng dan diskusi Film MAR dan Dua Garis Biru, siaran radio dan audiensi ke DPRD Kabupaten Merangin untuk mendorong adanya kebijakan anggaran untuk pendampingan kasus, serta adanya produk kebijakan di bidang hukum tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.







Dokumentasi kegiatan FPM Dampingan APM

FPM Bengkulu

Perayaan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober digunakan Forum Perempuan Muda (FPM) dampingan Cahaya Perempuan WCC untuk memastikan perempuan muda aktif dan antusias mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta mempromosikan kesadaran public yang lebih besar mengenai kesehatan seksual di propinsi Bengkulu. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Gubernur Nomor 33/ 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Tujuan kegiatan ini adalah agar kelompok dampingan dapat memahami prinsip dasar Value Clarification and Action Transformation (VCAT) sekaligus memperkuat perspektif HKSR, khususnya issue kritis yang dihadapi perempuan muda di wilayah masing-masing. Dengan demikian mereka mendapatkan informasi langsung dan memberi masukan mengenai layanan kesehatan seksual reproduksi yang diselenggarakan Negara. Masukan yang dimaksud adalah bentuk video kreatif karya anggota FPM dampingan Cahaya Perempuan WCC. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Lokalatih FPM Bengkulu dampingan Cahaya Perempuan WCC dengan tema "Para Muda Pelaku Peningkatan Akses Kualitas Kespro yang tepat dan bermutu ". Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 (digunakan untuk peningkatan kapasitas)- 26 (digunakan untuk aksi kolektif putar video kreatif karya FPM) Oktober 2019 dengan jumlah peserta 90 (87 perempuan & 3 Laki-laki). Forum Perempuan Muda (FPM) Provinsi Bengkulu menyatakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Kabupaten, Desa, Kelembagan Agama, Kelembagan Adat Provinsi Bengkulu untuk segera melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, kota, desa dan stakeholder segera merancang kebijakan dan melaksanakan rencana aksi daerah tentang pencegahan perkawinan usia anak.
2. Pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan dasar 12 tahun.
3. Guru dan orang tua memberikan pendidikan kesehatan seksual dan Reproduksi di sekolah dan di rumah sejak dini.
4. Membuka akses bagi anak muda terutama putus sekolah untuk usaha ekonomi kreatif.
5. Pemangku Agama/Adat secara aktif mensosialisasikan dampak perkawinan anak dan upaya perlindungan HKSR.



Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang dimulai pada tanggal 25 November hingga 10 Desember merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan

terhadap perempuan di seluruh dunia. Hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran pada diri aktifis perempuan yang menggeluti bidangnya masing-masing dalam mendukung pengesahan RUU P-KS. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Lokalatih Womens #CollaborACTION yang melibatkan aktifis Perempuan Muda baik yang telah tergabung di FPM dampingan Cahaya Perempuan WCC, organisasi kampus, maupun di lingkungan (RISMA, Karang Taruna) dan Kelompok Belajar Feminis dengan menghadirkan pakar RUU P-KS untuk membedah isi rancangan undang-undang tersebut serta Cahaya Perempuan WCC sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Lokalatih *Women #collaborACTION* di kantor Cahaya Perempuan WCC yang didanai oleh Aliansi Satu Visi dilaksanakan pada tanggal 9-10 Desember 2019.

Para aktivis perempuan muda yang terlibat dalam kegiatan ini mengharapkan pemerintah Daerah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum dan pemangku Agama dan kelembagaan Adat, segera menindaklanjuti :

1. DPR bersama Pemerintah Pusat harus segera menetapkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
2. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, desa dan stakeholder segera merancang kebijakan dan program KTP-A daerah dan pencegahan perkawinan usia anak.
3. Guru dan orang tua memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah dan di rumah sejak dini.
4. Membuka akses bagi anak muda terutama sekolah untuk usaha ekonomi kreatif.
5. Pemangku Agama/Adat secara aktif mendukung korban dan penanganan KTP-A serta pencegahan perkawinan usia anak.
6. Aparat penegak hukum harus melakukan penanganan yang cepat dan menjatuhkan hukuman yang berat pada pelaku KTP-A di Bengkulu.



Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya perkawinan anak; Mensosialisasikan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan (batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 19 tahun); Mendorong keterlibatan dan komitmen semua pihak dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan anak.

FPM Lampung

Di Lampung, kasus anak dan perkawinan paksa meningkat sekitar 30 hingga 50% (2015-2016) yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan, kemiskinan, dan perjodohan (data Pengadilan Tinggi Agama). Dengan perincian, ada 71 kasus anak dan pernikahan paksa di Provinsi Lampung pada 2015; 26 kasus di Metro, 2 kasus di Tanjung Karang, 1 kasus di Kalianda, 9 kasus di Kotabumi, 9 kasus di Krui, 9 kasus di Tulang Bawang, 3 kasus di Blambangan Umpu, 3 kasus di Tanggamus, dan 9 kasus di Gunung Sugih.

Kasus-kasus anak dan pernikahan paksa meningkat pada tahun 2016 menjadi 102 kasus dengan rincian; 23 kasus di Metro, 7 kasus di Tanjung Karang, 3 kasus di Kalianda, 26 kasus di Kotabumi, 14 kasus di Tui Bawang, 8 kasus di Tulang Bawang, 5 kasus di Blambangan Umpu, 9 kasus di Tanggamus, dan 7 kasus di Gunung Sugih

Berkenaan dengan hal tersebut, pada momentum kampanye 16 Hari anti kekerasan terhadap perempuan, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR bersama dengan lintas organisasi perempuan muda dan komunitas muda secara kolektif merapatkan barisan menyelenggarakan **Diskusi dan Deklarasi** dengan tema ***"Perempuan Muda bergerak bersama untuk pencegahan perkawinan anak"***. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya Empowomen, Korps PMII Puteri Prop.Lampung, Women's March, Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama Kota Bandarlampung, Bidang IPMAWATI PW IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) Propinsi Lampung, Forum Genre Indonesia Propinsi Lampung, Korps HMI Wati Kota Bandarlampung, Forum Puspa Propinsi Lampung, UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung, Forum Perempuan Muda Bandarlampung dan Forum perempuan Muda Lampung Selatan.

Kegiatan yang diadakan di Ballroom Hotel Emersia Bandar Lampung itu dibuka langsung oleh Walikota Bandarlampung, Bapak Drs, H. Herman HN, M.M. Dalam kesempatan tersebut Bapak Walikota menyampaikan, sosialisasi mesti dilakukan lebih dini dan berjangka. "*Ini harus disosialisasikan dari sekolah-sekolah mulai SMP hingga SMA dengan waktu terus menerus, agar tujuannya tercapai," kata Herman HN.*

Selain diskusi, pada kesempatan tersebut juga ditandatangani deklarasi pencegahan perkawinan anak. Penandatanganan diawali oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Kemudian perwakilan organisasi, dan beberapa pihak.

Berikut isi deklarasinya:

Hari ini, kami yang terdiri dari organisasi perempuan muda, komunitas muda, dan organisasi masyarakat lainnya mendeklarasikan pencegahan perkawinan anak dan mendukung UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak. Maka, kami berkomitmen:

1. *Bersama memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya perkawinan anak*
2. *Mendorong keterlibatan semua pihak dalam pencegahan perkawinan anak.*
3. *Berkontribusi membantu upaya pemerintah menurunkan angka perkawinan anak di kota Bandar Lampung.(*)*

Cerita Perubahan



Dari Tabu menjadi Tahu

Ditulis oleh : Ramona (Fasilitator Wilayah Pidie)



Nama Saya Wilzatul Husna. Saya lahir di Desa Karieng 20 September 2001. Pekerjaan saya sehari-hari mengaji dan membuat kawat beronjong yang upahnya hanya Rp.15.000,-. Itu saya lakukan untuk mendapatkan uang jajan sehari-hari.

Saya mempunyai sifat pendiam tapi rasa ingin tahu saya sangat besar. Saya bergabung dengan Kelompok Muda dampingan Flower Aceh pada tahun 2017. Awalnya saya mengenal Flower Aceh dari orang tua saya sendiri yang dulu nya juga anggota dampingan Flower Aceh.

Setelah saya bergabung dengan kelompok Cut Putroe Karieng, saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi, sesuatu yang tidak saya dapatkan di sekolah ataupun di tempat pengajian. Walaupun ada sedikit sessi soal HKSR, menurut saya ada banyak yang ditutupi dan penjelasannya tidak detil. Awalnya ketika mendapatkan penjelasan detil tentang Kesehatan Reproduksi, saya juga malu-malu dan senyum-senyum sendiri apalagi ketika mengenal organ – organ reproduksi, tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh.

Saya juga semakin mendalami kekerasan seksual yang ternyata banyak dialami oleh perempuan muda, serta hal –hal lainnya yang membuat saya semakin tertarik dengan materi seputar kesehatan reproduksi. Dari awal dimana saya tidak tahu menahu apa itu kebersihan, kesehatan bahkan kebersihan dan kesehatan diri saya sendiri. Saya kurang peduli tetapi setelah saya mendengar cerita dan ilmu yang dibagikan oleh Flower Aceh, saya jadi takut sendiri dan ternyata kebersihan dan kesehatan diri kita sendiri itulah yang paling penting kita jaga agar tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan.

Saya juga terkejut mendengar terkait dengan pernikahan anak, ternyata itu tidak boleh kita lakukan, minimal kita menikah umur 20 tahun. Padahal banyak anak – anak seusia saya yang ketika lulus Sekolah Menengah Pertama langsung dinikahkan, tanpa tahu bahwa pernikahan usia anak membawa dampak buruk bagi kesehatan reproduksi. Dulu saya juga sempat berpikir kalau lulus sekolah dan tidak lanjut kuliah maka lebih baik menikah saja agar ada yang menafkahi. Beruntung saya segera mengenal Flower Aceh sehingga hal tersebut dapat dihindari.

2 tahun setelah saya bergabung dan mendapatkan banyak ilmu di kelompok, saya juga mengajak adik dan teman–teman lainnya untuk bergabung dengan kelompok. Saya berharap mereka juga mendapatkan banyak ilmu seperti yang saya dapatkan, berlatih bagaimana berbicara dan mengeluarkan pendapat.

Tentunya dengan ilmu yang saya dapat bisa saya bagikan kepada kawan-kawan saya di desa lain yang tidak ada kelompok seperti di desa saya. Saya beruntung di desa saya ada kelompok dampingan Flower. Jadi inilah sekolah baru saya tempat menimba ilmu dan berbagi pengalaman bersama.

Harapan saya ke depan semoga Flower Aceh terus berkarya dan bisa memberikan yang terbaik khusus nya kepada anak anak muda,karena semua pengalaman hidup bermula dari pengalaman anak muda itu sendiri.

Bersama CU, Menjangkau Perempuan Nias yang tertinggal.

Ditulis oleh : Dian Zebua-Staf Lapang Pesada di Nias.



Nama saya Suniati Laia, umur 45 tahun. Saya tinggal di Desa Gunung Cahaya, Kecamatan Sirombu, Nias Barat. Sehari-hari saya membuka warung di rumah, menjual kebutuhan pokok. Aktifitas ini bisa saya lakukan sambil mengasuh dan membesarkan ke 4 anak saya (1 perempuan dan 3 laki-laki).

Awalnya saya mengenal Pesada dari Pengurus CU unit Fama'ano, desa tetangga dan sangat tertarik agar kegiatan serupa ada di desa kami. Saya sangat ingin memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang perempuan dan dengan semangat menanyakan syarat-syarat pembentukan kelompok kepada pengurus tersebut.

Satu minggu kemudian, kami mengundang staf Kopwan Faolala untuk datang ke desa kami yaitu Mawar Zebua & Ani Harefa untuk melakukan sosialisasi tentang CU dan aturan-aturannya. Berdasarkan kesepakatan bersama, semua orang yang hadir pada saat itu setuju dengan pembentukan CU. Dari 20 orang yang hadir, 11 orang langsung melakukan aktifitas menabung pada saat itu. Terbentuklah kelompok CU di desa kami dengan nama Unit Ononota (artinya tambahan) dampingan Pesada tahun 2016. Saya dipercaya menjadi Pengurus Unit hingga sekarang.

Tugas saya sebagai Pengurus Unit adalah melakukan penabungan setiap bulan, mengikuti rapat wilayah 1x6 bulan, mengikuti pelatihan2 yang di selenggarakan oleh Pesada dan mengikuti RAT 1x1 tahun. Ini membuat pengetahuan saya bertambah luas, kemampuan saya meningkat di dalam memotivasi para perempuan sehingga mau berkelompok. Saya juga terpilih sebagai sekretaris SPUK wilayah Nias Barat. Saya juga belajar membuat extra VCO, sehingga menambah pendapatan dalam keluarga saya.

Sebelum saya mengenal Pesada, saya hanya mengumpulkan perempuan untuk arisan saja & tidak ada pendidikan atau diskusi. Tetapi setelah bergabung melalui CU Pesada, perubahan demi perubahan saya alami. Perubahan terbesar, saya mampu membeli tanah tahun 2018 & sepeda motor tahun 2019, atas nama saya sendiri. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya.

Saya semakin mampu membagi waktu antara pekerjaan di rumah, anak-anak, pelayanan di gereja dan melakukan tugas sebagai PU. Di dalam keluarga besar, saya bisa memberikan saran sehingga mampu mempengaruhi keputusan yang disepakati/disetujui keluarga.

Di lingkungan saya tinggal, saya rajin memotivasi perempuan desa untuk bergabung di CU untuk menyisihkan pendapatan untuk ditabung, kemudian dari hasil menabung di CU beberapa atau sebagian perempuan desa sudah memiliki asset sendiri. Yang tak kalah membanggakan, sejak November 2018, saya dipercayakan sebagai kader OSS&L di Puskesmas Sirombu. Saya dipercaya memberikan informasi terkait pemenuhan HKSR kepada perempuan-perempuan yang datang mengakses layanan OSS&L. Untuk kegiatan ini, saya memahami sangat penting menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan, karena perempuan-perempuan tersebut telah mau berbagi pengalamannya kepada kita karena mereka percaya kepada kita.

Saya yakin, akan semakin banyak perempuan-perempuan di pedesaan yang tertolong melalui layanan yang diberikan Pesada.

Saya, Anggota BPD Perempuan Pertama Di Desa Pulau Jambu

Ditulis oleh: Tika Widya (Staf lapang PPSW Sumatra)



Nama saya Leni Marlina, usia saya 37 tahun dan tinggal di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Saya ikut bergabung menjadi anggota kelompok dampingan PPSW Sumatra sejak tahun 2016. Kelompok simpan pinjam kami bernama "Maju Bersama". Di kelompok saya sebagai salah satu pengurus dan sampai saat ini kelompok kami sudah beranggotakan 34 orang perempuan yang ada di desa Pulau Jambu. Awalnya saya cuma mengira bahwa kegiatan PPSW hanya sekedar kegiatan terkait simpan pinjam saja tetapi setelah mengikuti seluruh proses kegiatannya saya senang karena begitu banyak pembelajaran yang saya dapatkan seperti pengetahuan terhadap Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), Kepemimpinan Perempuan, Simpan Pinjam dan hak kita sebagai perempuan.

Sebelum didampingi PPSW Sumatra saya sudah terlibat mengikuti beberapa organisasi atau kegiatan yang ada di desa seperti PKK, wirid, dan kader posyandu. Seperti kegiatan organisasi perempuan pada umumnya kami hanya berkumpul dan setelah itu pulang. Berbeda dengan kelompok koperasi simpan pinjam yang didampingi PPSW Sumatra selain melakukan aktifitas simpan pinjam setiap bulannya kami diberikan peningkatan kapasitas mulai dari Penyadaran Gender, Managemant Koperasi, Pendidikan Politik, Kepemimpinan Perempuan dan Pendidikan Mengenai Hak Kesehatan Seksual Dan Reproduksi (HKSR). Begitu banyak peningkatan kapasitas yang kami dapatkan dari kelompok yang didampingi PPSW Sumatra tidak hanya sekedar mengetahui tetapi kami juga punya kesadaran bahwa kami sebagai perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki yang selama ini belum kami ketahui.

Selain dampingan kelompok kami juga membentuk Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) disana merupakan wadah untuk perempuan belajar dan menyampaikan persoalan perempuan yang ada diwilayah masing-masing, Dari FKPAR saya banyak tahu bahwa begitu banyak persoalan perempuan yang belum bisa terselesaikan dan banyak nya hak perempuan yang belum bisa kami dapatkan salah satunya adalah menjadi pemimpin publik yang selama ini di desa kami hanya mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin.

Pada saat itu di desa kami sedang melaksanakan pemilihan BPD(Badan Pemusyawaratan desa), saya termotivasi untuk mencalonkan diri karena menurut saya jika perempuan ada yang menjadi pemimpin publik di desa setidaknya persoalan perempuan bisa di dengar dan mendapatkan solusi terbaik. Dan akhirnya kami dari kelompok dampingan selalu mencari informasi terkait dengan proses pemilihan BPD tersebut sampai akhirnya saya dan beberapa anggota dampingan ingin mencalonkan diri menjadi Ketua BPD. Melihat banyaknya calon laki-laki pada saat itu, dari kelompok dampingan akhirnya kami melakukan konsolidasi untuk mengajukan 1 orang calon perempuan dari dampingan, ini adalah salah satu strategi yang kami lakukan untuk mendapatkan posisi di BPD. Akhirnya saya yang maju menjadi calon BPD pada saat itu.

Setelah melewati beberapa proses dan akhirnya saya terpilih menjadi anggota BPD didesa Pulau Jambu, rasanya saya sangat senang karena saya anggota BPD perempuan pertama di desa saya yang selama ini di dominasi oleh laki-laki. Dari proses panjang yang saya lakukan saya belajar bahwa kita sebagai perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan yang paling penting ketika kita sudah memiliki kesadaran itu langkah selanjutnya adalah bertindak dan bergerak. Hasil yang saya dapatkan sekarang tidak lepas dari proses pembelajaran saya selama ini dan yang paling penting saya merasakan bahwa kekuatan kolektif perempuan sangat berperan penting untuk mencapai dan memenuhi hak kita sebagai perempuan yang selama ini hanya dianggap nomor dua. Semoga dengan posisi saya sekarang saya bisa berjuang mewakili suara perempuan khususnya didesa saya. Saya akan selalu belajar untuk meningkatkan kualitas diri dan kapasitas saya sebagai seorang perempuan.

Ketika Milenial Kampanyekan Kesehatan Reproduksi

Ditulis oleh: Muziatur Rahma, Staf Lapangan LP2M



Bagi sebagian orang, membicarakan kesehatan reproduksi dianggap tabu, memalukan bahkan menjijikkan. Namun tidak bagi Mega Amdani Febrianti, meskipun masih berusia 18 tahun, dia aktif mengajak anak-anak muda di lingkungannya berdiskusi soal kesehatan reproduksi.

Awal mula Mega mengkampanyekan kesehatan reproduksi saat diajak tantenya ikut Pelatihan Kesehatan Reproduksi (Kespro) untuk remaja yang diselenggarakan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (LP2M), awal 2018 lalu di Padang.

"Saat memasuki usia remaja saya lebih banyak bermain dari pada belajar, sering keluar malam hari, melihat pertunjukan orgen sehingga sering dimarahi ibu," kata Mega yang tinggal di Nagari Aia tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Dari pelatihan pertama itu, Mega baru menyadari pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini agar terhindar dari berbagai penyakit menular seperti HIV/Aids. "Saya juga baru mengetahui soal hubungan seksual sejak dini," katanya.

Keinginan untuk berbagi soal kesehatan reproduksi kepada anak-anak muda lainnya membuat Mega membentuk Kelompok Perempuan Muda (KPM) Permuka atau Perempuan Muda Berkarya di Nagari Aia Tajun. Meskipun awalnya diremehkan namun Mega tak berkecil hati mengumpulkan anak-anak muda di lingkungan tempat tinggalnya dan berbagi soal pengetahuan kesehatan reproduksi.

Satu per satu anggota Permuka mengundurkan diri dengan berbagai alasan tidak membuat Mega patah semangat. Berbagai cara dilakukan agar pertemuan dan diskusi menarik seperti membuat diskusi di pinggir pantai dengan suasana lebih santai.

Keaktifannya dalam kegiatan kesehatan reproduksi membawa Mega bergabung dalam Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di sekolahnya SMKN Enam Lingkung. Bersama tim sekolah, Mega juga meraih juara lomba PIK-R yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri Bukittinggi.

Mega mengkampanyekan kesehatan reproduksi melalui diskusi kelompok. Awalnya Mega merasa pesimis dengan tantangan tersebut, karena menurutnya mengajak orang untuk berkumpul itu tidak mudah apa lagi anak seusianya sibuk sekolah. Perlahan-lahan Mega mulai menceritakan pengalaman yang ia dapatkan selama menjadi anggota Kelompok Perempuan Muda kepada keluarga sehingga pandangan terhadap Mega yang dianggap suka keluyuran sudah mulai berubah di mata keluarga. Mega mulai mendapat kepercayaan. Dengan penuh keyakinan Mega mulai mengajak teman-teman sebayanya untuk membentuk Kelompok Perempuan Muda di Nagari Aia Tajun.

Pada awal pembentukaan kelompok ada 11 orang yang hadir. Pertemuan pertama dimulai dengan menyepakati nama kelompok, pembentukan struktur kelompok, tujuan dan rencana kerja kelompok untuk ke depan. Dalam pertemuan tersebut, Mega dipercaya menjadi ketua, Thalia menjadi sekretaris dan Aisyah menjadi bendahara.

Berselang waktu satu bulan untuk pertemuan selanjutnya Mega menghubungi teman-temanya untuk mengingatkan bahwa hari pertemuan kelompok sudah dekat. Sebanyak lima orang dari 11 orang tersebut mengundurkan diri dengan alasan banyak pekerjaan rumah, mengasuh keponakan dan ada yang menolak dengan menyatakan hari minggu adalah hari libur. Diantara yang mengundurkan diri itu termasuk bendahara dan sekretaris.

Kala itu Mega menyampaikan keluh kesahnya kepada kedua CO KPUK PERMATA karena hampir separuh anggota menyatakan mundur. Setelah mendengarkan pengalaman jatuh bangunnya CO dalam membentuk KPUK PERMATA, Mega kembali semangat dan banyak meminta masukan kepada kedua CO tersebut. Berkat bergabung dengan kelompok perempuan muda ini, Mega aktif dalam organisasi OSIS di sekolahnya.

Sayang & Peduli Terhadap Tubuh Sendiri, Adalah Kunci

Ditulis oleh : Sutiyem, Staf APM Jambi



Nama lengkapnya Lenni Purwaningsih, biasa di panggil mbak Leni. Berusia 43 tahun. tepatnya lahir di Medan pada tanggal 22 Januari tahun 1977 yang lalu. Ibu dari dua orang putra ini berdomisili di RT 01 Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin – Jambi. Bekerja sebagai Wiraswasta, tepatnya membuka toko pertanian dan jasa pengiriman barang. " saya mulai bergabung dengan kegiatan APM sejak bulan November 2017, tanggal persisnya tidak ingat", ujarnya ketika saya tanya sejak kapan mulai bergabung dengan kegiatan APM. Dia menceritakan tentang kegiatan – kegiatan yang pernah diikutinya selama bergabung dengan Aliansi Perempuan Merangin, diantaranya adalah : Perayaan hari kesehatan Seksual di Bappeda, , Pertemuan FKPAR di Talang Kawo, Pelatihan tentang SDGs, Pelatihan CU/Koperasi Wanita di Bukit Bungkul, PRIMEL Permampu di Medan dan kegiatan audiensi ke DPMPD, PP&KB dan DPRD Kabupaten Merangin.

Menurutnya setelah mengikuti beberapa kegiatan bersama APM, banyak perubahan – perubahan yang dia alami, baik yang terjadi dalam tingkatan individu, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan – perubahan tersebut diantaranya : Lebih merasa percaya diri, menambah pergaulan, bertambah ilmu pengetahuan.

Dalam rumah tangga lebih bersikap dewasa dalam mengambil keputusan dan bisa menjelaskan kepada keluarga tentang manfaat HKSR dan masalah kenakalan remaja. Saling terbuka dan lebih dekat degn keluarga. Dimasyarakat mampu membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada ibu – ibu lainnya tentang pentingnya penguatan ekonomi dan HKSR. Selain itu kini dia juga sudah bergabung diberbagai kegiatan kecamatan dan kabupaten

Saya sebagai penulis kemudian menanyakan, dari sekian banyak perubahan positif diatas, menurut mbak Lenni, perubahan mana yang paling penting?. Dia Menjawab" Mendapat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan dalam penguatan ekonomi, sehingga saya bisa membantu perekonomian keluarga, usaha yang ada bisa kita mengatur keuanganya dengan ikut koperasi wanita di kelompok, sehingga kepercayaan suami terhadap kegiatan APM yang saya ikuti mendapat pandangan yang positif. Dalam masyarakat sering mendapat kepercayaan sebagai pengurus dalam kegiatan atau organisasi maupun politik. Dulu bicara masalah seks adalah sesuatu yang tabu, tapi kini sudah tidak begitu lagi. Sudah banyak perempuan yang mau ikut IVA Test atau papsmer, bahkan puskesmas di wilayah saya juga sudah mengakui sejak adanya APM peserta IVA Test meningkat jumlah pesertanya", tuturnya panjang lebar kepada saya.

Diakhir cerita mbak Lenni menyampaikan harapannya kepada APM, diri sendiri dan semua Perempuan, " Semoga dengan kegiatan ini bisa membentuk pribadi yang mandiri, bermanfaat bagi perempuan dan orang lain, memberikan rasa percaya diri akan kemampuan diri. Perempuan sayang dan peduli terhadap tubuh sendiri sehingga selalu menjaga kesehatan dengan bai. APM mampu membentuk perempuan yang dihormati, bermartabat dan sehat secara spiritual, serta mampu menjadi ibu yang baik buat keluarga".

Nelayan Laki-laki Pesisir Peduli Perempuan dan Anak

Ditulis oleh : Eka Fitriani Prihatin-Koordinator Program CP WCC



Nama saya Hamdani, orang-orang memanggil saya dengan Dani. Saya tinggal di Kota Bengkulu tepatnya di Jalan Letda Abuhanifah RT 06 RW 08 Kelurahan Pondok Besi, Kota Bengkulu. Saya memiliki seorang istri bernama Ani dan tiga orang anak, dua anak Laki-Laki dan satu anak perempuan. Pada tahun 2016 adalah awal mula saya mengenal lembaga Cahaya Perempuan WCC. Lembaga ini datang untuk memfasilitasi diskusi kritis kelompok ibu-ibu bernama CU Pelita Hati Bunda. Saya banyak mengetahui mengenai kegiatan Cahaya Perempuan WCC dari istri saya Ani yang tergabung dalam CU itu. Saya bersyukur karena Cahaya Perempuan WCC dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari perempuan dewasa yang sudah menikah, perempuan muda, dan laki-laki dewasa dan pelibatan laki-laki muda juga yang ada di kelurahan saya. Cahaya Perempuan WCC juga melibatkan pihak Puskesmas karena kegiatan mereka berkaitan dengan kesehatan perempuan dan remaja. Ketika terpilih menjadi Ketua RT tahun 2016, saya semakin bersemangat mendorong aktifitas CU Pelita Hati Bunda dan Berlian Muda yaitu Kelompok Perempuan Muda. Saya juga bekerjasama dengan Cahaya Perempuan WCC untuk memfasilitasi arisan rutin RT setiap bulan, agar warga mendapatkan informasi secara menyeluruh.

Kegiatan diskusi kritis CU Pelita Hati Bunda. Ibu-ibu dikuatkan dan diberikan penyadaran mengenai HKSR, isu gender, Hak Asazi Perempuan bahkan pendidikan politik selain menabung dengan model sistem simpan pinjam (Credit Union). Uang dari penabungan itu bisa membantu ibu-ibu anggota untuk modal usaha mereka. Pendekatan ini menarik perhatian saya maka itu saya berusaha untuk bisa hadir dalam diskusi mereka. Mereka melakukan pertemuan di rumah anggota secara bergiliran. Sejauh ini, diskusi di kelompok berjalan aktif, diawali dengan cerita atau masalah yang dihadapi seharai-hari oleh anggota kelompok seperti terkait anak, suami, dan tetangga dan mencari solusi bersama. CP WCC juga mendidik kader-kader CU ini sebagai Pendamping Lokal agar dapat memberikan informasi dan penguatan pada anggota sesegera mungkin. Tujuannya yang saya pahami agar anggota kelompok CU belajar mandiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Begitupun untuk diskusi kelompok Berlian Muda. Anggota perempuan dan laki-laki muda juga aktif melakukan diskusi dengan isu yang bermacam-macam dan memotivasi anggota kelompok untuk menyelesaikan sekolah mereka tidak hanya persoalan seputar HKSR remaja. Kelompok Berlian Muda juga terlibat dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual di lokasi wisata di sepanjang pesisir Pantai Panjang dengan cara memberikan pemahaman kepada teman sebaya tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual. Sebagian dari wilayah wisata pantai ini masuk dalam wilayah kelurahan dan RT saya.

Selain itu, ada juga diskusi kelompok untuk laki-laki dewasa yang dilaksanakan 3 bulan sekali. Kelompok laki-laki dewasa diberi pemahaman bahwa peran gender dan peran laki-laki dalam keluarga misalnya mengurus anak, peran sebagai suami, memenuhi kebutuhan ekonomi tidak bisa dibebankan sendiri pada istri. Ternyata penting sekali menalin komunikasi yang baik antara suami dan istri agar bisa memutuskan hal-hal penting dalam rumah tangga. Bapak-bapak juga diberikan informasi dan penyadaran mengenai kesehatan reproduksi laki-laki, bahwa laki-laki (suami) jika bersedia dan sadar menggunakan alat kontrasepsi maka mereka telah berkontribusi dalam melindungi istri mereka dari berbagai penyakit Kespro.

Secara khusus saya berdiskusi bersama kawan-kawan Cahaya Perempuan WCC terkait pentingnya penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi, perlunya melakukan pemeriksaan kesehatan melalui Posyandu, serta pemberian tablet tambah darah untuk perempuan dewasa dan anak muda. Selain itu saya juga merupakan Pelindung dari CU Pelita Hati Bunda. Peningkatan kapasitas yang saya peroleh satu setangah tahun terakhir sebagai anggota Forum Laki-laki Peduli HKSR adalah:

- Pelatihan Kesehatan Reproduksi Berperspektif Gender
- Dialog Forum Multi Stakeholder Kota Bengkulu
- Lobby/Hearing mendesak Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pencegahan Perkawinan Anak

- Sosialisasi Implementasi Peraturan Gubernur no. 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak
- Seminar dan Lokakarya Penyusunan Perencanaan Strategis Cahaya Perempuan WCC

Perubahan yang saya alami selama satu tahun terakhir ini, saya mempunyai pengetahuan yang baik mengenai Gender dan hubungannya dengan HKSR dan Hak Asazi Perempuan. Bagaimana penting peran dan kontirbusi pemikiran perempuan dalam perencanaan program dan kegiatan di RT, Kelurahan bahkan di arena yang lebih luas. Sebagai RT, hal ini penting bagi saya dalam membuat keputusan dan penyelesaian masalah yang terjadi lingkungan kami. Saya juga menyadari bahwa perempuan kelompok paling rentan terkena penyakit Kespro dibandingkan laki-laki – para suami.

Kesadaran baru ini memberikan nilai positif yang lain sebagai suami dan ayah selaku Ketua RT 6 Kelurahan Pondok Besi. Saya bersama istri terpilih sebagai Champion Keluarga Peduli HKSR 2018 di untuk wilayah Kota Bengkulu. Saya aktif mengkampanye kepada warga agar suami dan istri saling menguatkan, mengingat dan menjaga agar istri dan anak mereka terutama perempuan untuk mau memeriksakan diri ke Puskesmas, jika ada keluhan atau masalah kesehatan pada organ reproduksi mereka. Pada tahun 2019 saya dan istri kembali terpilih menjadi pasangan Keluarga Peduli HKSR di wilayah Kota Bengkulu dan tingkat provinsi. Saya aktif dan terus bersemangat melaksanakan program pemberdayaan untuk perempuan dan anak bersama kelurahan meskipun persentasi kehadiran warga hanya sekitar 65%. Saya melibatkan pihak lain seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Puskesmas, LSM lain selain Cahaya Perempuan WCC untuk memberikan sosialisasi dan pemberdayaan hukum kepada warga, mengingat Kelurahan Pondok Besi berdekatan dengan objek wisata sehingga banyaknya kasus kenakalan remaja. Dan saya juga membuat kegiatan di RT bagi anak-anak berkaitan dengan pendidikan seks sejak dini. Kegiatan ini untuk menyiapkan ketahanan diri anak-anak yang rentan dari pelecehan seksual.

Perubahan yang paling bermakna saya rasakan sebagai laki-laki dan suami ketika saya terpilih sebagai Champion Keluarga Peduli HKSR dengan 10 indikator penilaian selama 2 tahun terakhir ini. Salah satu indikator penilaian yang paling berat bagi saya adalah hidup tanpa merokok. Saya hidup dan besar di lingkungan yang sangat maskulin yakni kehidupan nelayan kecil di daerah pesisir pantai di Kota Bengkulu. Umumnya nelayan laki-laki merokok, kalau tidak merokok disindir dan dikatakan "laki-laki kemayu". Ini yang saya hadapi. Tapi saya tak peduli, bagi saya lebih penting hidup sehat supaya bisa mencari ikan dan mendapat uang untuk keluarga saya.

Saya sebagai Champion Keluarga Peduli HKSR mengemban amanah sebagai *role model* bagi keluarga-keluarga nelayan yang lain untuk berprilaku hidup sehat. Dan sebagai RT saya mempunyai tugas bagaimana semua warga saya juga menjadi keluarga yang berprilaku sehat secara fisik, mental dan sosialnya. Salah satu Pekerjaan Rumah (PR) berat saya adalah mendidik setiap keluarga nelayan menyisihkan tangkapan ikan untuk konsusmsi keluarganya, tidak semua untuk dijual agar keluarga terutama anak-anak mereka memenuhi kecukupan gizi, tumbuh dan berkembang dengan sehat – terbebas dari *stunting*. Dengan status yang saya sandang saat ini, menjadi modal dan mempermudah saya dalam menyelesaikan "PR" sebagai RT sekaligus kemampuan untuk mempengaruhi perangkat pemerintah kelurahan dan Kota Bengkulu dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di RT dan kelurahan saya

"Berjuang Bersama untuk Perempuan Lebih Maju dan Sejahtera"

(Anggota Kelompok "Selanting Jaya" Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim)



Nama saya Novi Triana, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak dan tinggal di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim. Selain mengurus rumah tangga, saya juga seorang Bidan Desa di Desa Karang Endah Selatan Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim. Dengan pekerjaan itu saya sudah terbiasa setiap harinya berhadapan dengan anak - anak balita dan ibu hamil.

Saya bergabung menjadi anggota kelompok "Selanting Jaya" Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim sudah 2 (dua) tahun, awal saya bergabung itu mendengar cerita kakak saya yang sudah lebih dahulu bergabung menjadi anggota kelompok Selanting Jaya Desa Sigam Kec. Gelumbang kab. Muara Enim. Saya merasa terinspirasi karena kelompok ini membahas atau menceritakan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan perempuan, serta mendukung dan memotivasi perempuan untuk lebih maju sehingga setara dengan laki- laki. Selain itu setiap bulan diadakan pertemuan rutin bulanan dengan berbagai materi yang disampaikan oleh tim WCC Palembang terutama tentang materi kesehatan perempuan, banyak ilmu pengetahuan baru yang saya dapatkan dan saya baru menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan terutama kesehatan reproduksi bagi perempuan. Materi yang saya dapatkan pada saat diskusi krtis bulanan di kelompok membuat saya lebih percaya diri untuk berbicara didepan umum, ilmu yang saya dapatkan juga saya sampaikan kepada ibu-ibu yang datang di Polindes tempat saya bekerja saat posyandu. Terus terang, saya menjadi punya banyak bahan/materi yang bisa saya sampaikan ketika kegiatan posyandu, dan hal ini membuat kegiatan posyandu baik kegiatan penyuluhan maupun kelas ibu hamil menjadi tidak monoton.

Selain dari itu ada lagi hal yang menarik menurut saya setelah saya bergabung menjadi anggota kelompok yaitu setiap anggota diwajibkan untuk menabung di CU atau menjadi anggota CU. Saya sangat merasakan manfaat menjadi anggota CU diantaranya: saya mempunyai tabungan sendiri, saya juga bisa mendapatkan pinjaman menambah modal untuk usaha saya berjualan online dan untuk membantu perekonomian rumah tangga sehingga saya sekarang menjadi mandiri dalam masalah perekonomian karena saya bisa mempunyai penghasilan sendiri dari hasil berjualan online.

Saya tertarik meminjam di CU karena bunganya kecil dan menurun dan yang membuat saya menjadi tambah yakin untuk menabung dan meminjam di CU karena seluruh keuangan, pembukuan di pegang dan di kelola oleh pengurus kelompok sendiri yang tinggal satu daerah dengan kita.
Saya sangat senang bergabung menjadi anggota kelompok dampingan WCC Palembang dan juga menjadi salah satu pengurus di FKPAR Sumsel karena setiap pertemuan FKPAR Sumsel di Palembang saya bisa bertemu dengan teman-teman yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di kota ataupun kabupaten di Propinsi Sumsel lainnya.

Dulu, Aku Fikir Bermanfaat Tidak Harus Jadi Pejabat; Diposisi itu agar bisa mempengaruhi kebijakan yang lebih merakyat.

Ditulis oleh : Ana Yunita Pratiwi, Staf Damar Perempuan Lampung



Mestifah namaku, 47 tahun sudah berlalu usiaku. Aku terlahir di desa Sadar Sriwijaya Kabupaten Lampung Timur 23 Agustus 1972. Usia 22 tahun aku menikah dan dikaruniai 2 buah hati tercinta. Seorang laki-laki yang telah menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Islam Indonesia dan seorang puteri sedang menjalankan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang. Tak seperti perempuan pada umumnya, aku memperoleh akses, ruang leluasa dari orang tuaku sejak kecil. Mengenyam pendidikan sampai SMA, selain sebagai pelajar juga mencari penghasilan dengan memanjat pohon kelapa yang cukup tinggi untuk dipetik buahnya dan dijual (borongan), tak masalah bagiku semua itu. Setelah lulus SMA aku harus ikut kakakku untuk merantau dan bertanggung jawab atas sekolah adik-adikku.

Dua tahun setelah menikah tahun 1996, aku pindah ke desa Sidodadi Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Sebuah desa perbatasan antara kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang dan aku mulai membaur dengan kehidupan menjadi ibu kantin di sebuah perusahaan udang di Tulang Bawang. Tahun 2000-an, aku mulai bergabung dengan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan memperoleh pendidikan kritis 4 modul; pertama, Pendidikan Adil Gender dan Anti Kekerasan, kedua Pendidikan Analisa Sosial dan Feminism, ketiga Pendidikan advokasi dan Pengorganisasian dan keempat pendidikan kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Ada kata yang sangat melekat dalam ingatanku dari pendidikan itu bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan dan potensi **"kita pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa, bisa-tidak-bisa-harus-bisa"**, kata itu yang terus mamacu kepercayaan diriku. Tahun 2005 dari hasil pendidikan kritis yang dilakukan DAMAR, kami bersepakat untuk membangun kekuatan bersama dengan berserikat yang diberi nama Forum Anti Kekerasan Lampung Tengah dan aku diminta untuk menjadi koordinatornya di kabupaten Lampung Tengah.

Aku selalu bersemangat dalam kerja-kerja sosial, tahun 2007 aku diminta beberapa teman untuk mendirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dengan pertimbangan hanya ada satu PAUD di desa dan anak-anak usia dini membutuhkan akses yang mudah dan dekat untuk dijangkau. Aku mendalami selama satu tahun proses menjadi pengelola PAUD dan aku lihat ada penyalahgunaan bantuan PAUD yang tidak adil dan merata. Tahun 2008 berdasarkan usulan teman-teman guru, aku dipilih menjadi ketua IGTK (ikatan guru taman kanak) di Kec. Bandar Surabaya. Mewakili kepentingan mereka hingga aku termotivasi melanjutkan pendidikan sarjana Pendidikan pada tahun 2011 dan lulus tahun 2013 dengan akses beasiswa pun beberapa guru perempuan aku dorong untuk melanjutkan pendidikan sarjana.

Kapasitasku semakin menguat ketika memperoleh pendidikan-pendidikan kritis yang difasilitasi melalui program PERMAMPU dengan dukungan dari kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (MAMPU). Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan kepemimpinan perempuan akar rumput yang aku peroleh diantaranya:

1. Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah II Forum Advokasi Kemanusiaan Lampung Tengah sebagai ruang konsolidasi perempuan akar rumput di Lampung Tengah
2. Rencana Strategis Gerakan Perempuan Lampung (FKPAR Propinsi Lampung)
3. Pesta Perayaan Gerakan Perempuan Akar Lampung "Kepemimpinan Perempuan untuk Kesehatan Keluarga, Perempuan Muda dan Perempuan Des
4. Pendidikan Kepemimpinan Perempuan dan Politik Perempuan tentang Strategi serta Taktik Pemenangan Pemilihan Kepala Desa dan RT
5. Perayaan dan konsolidasi FKPAR Dampingan Permampu, "Berakar Kuat, Berjuang Bersama melawan Pemiskinan Perempuan", Pekan Baru 18-20 Oktober 2016
6. Diskusi Rutin Bulanan yang didalamnya juga membahas peluang dana desa, dll.

Perubahan penting dalam diriku, aku semakin berani menjadi pejabat publik yang **dulunya aku fikir bermanfaat tidak harus menjadi pejabat** namun tidak, kita harus ada diposisi itu agar bisa mempengaruhi kebijakan yang lebih merakyat. Pada mulanya menjadi pemimpin di organisasi keagamaan, organisasi sosial itu sudah cukup untuk ku bermanfaat, namun ternyata posisi itu belum bisa membawa banyak perubahan pada masyarakat. Ditambah kegelisahan-kegelisahan hati yang mulai

mencuat ketika aku sendiri dengan pengalamanku dan keluhan teman-teman yang merasa keberadaan dana desa kurang tepat sasaran.

Aku sendiri menyadari seperti di bodohi ketika tahun 2016, aku coba untuk masuk dan terlibat dalam musyawarah rembuk kampung dan mengusulkan untuk dialokasikan dana untuk pemberdayaan perempuan, dalam musyawarah usulanku diterima dan di iyakan akan dialokasikan 20 juta untuk pelatihan namun beberapa kali ditanyapun tidak ada hasil. Juga mendapati keluhan dana PKK yang tidak keluar, anggaran kesehatan hanya untuk beli seragam.

Tahun 2019 dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat atas pertimbangan pengalaman kepemimpinan di IGTK. Aku memutuskan maju untuk mencalonkan diri menjadi kepala kampung Sidodadi Kec. Bandar Surabaya –Lampung Tengah. Tidak mudah untuk akhirnya memutuskan siap, ada beberapa pertimbangan yang mendasari keputusan ini.

- Pertimbangan kandidat calon kepala kampung lain yang memiliki latar belakang catatan buruk sehingga ada kehawatiran jika mereka yang memimpin akan menjadi apa desa ini kedepan
- Situasi penggunaan dana desa yang kurang tepat sasaran
- Anggapan ketidakmampuan pemimpin perempuan untuk mengatasi persoalan desa seperti pencurian (*opo iso lak pemimpin wedok nangkep maling*) bahkan ada yang mengharamkan memilih perempuan jadi pemimpin.

Ketidakpercayaan mereka soal pemimpin perempuan justru menjadi motivasi dan menjadikan aku semakin percaya diri untuk menjadi kepala kampung dan membuktikan pada masyarakat tentang kepemimpinan perempuan. Pada bulan September dengan restu kedua anakku, aku mencalonkan diri menjadi kepala Kampung Sidodadi dan mengikuti tahapan pemilihan sesuai prosedur yang ada. Banyak tuduhan yang ditujukan padaku, mulai dari nomor urut ku yang kebetulan no. 1 (satu), penyebab kegagalan 2 bakal calon lain dalam tes tertulis, kampanye hitam yang dilontarkan, namun situasi itu yang membuat aku harus terus berjuang dan membuktikan.

7 November 2019 adalah puncak pemungutan suara setelah masa kampanye dan masa tenang yana aku lewati. Syukur alhamdulillah atas kepercayaan masyarakat, aku memperoleh suara terbanyak yaitu 860 pemilih dibandingkan perolehan suara 4 calon lain yang berjenis kelamin laki-laki. Ini adalah awal untuk membuktikan kemampuan kepemimpinan perempuan

Satu bulan setalah aku terpilih, pada 7 Desember 2019 kerjasama dengan Puskesmas Gayabaru V mengadakan pemeriksaan tes IVA gratis dan ada 25 perempuan yang mengakses tes IVA serta melakukan pemeriksaan perawatan gigi untuk anak usia dini. Aku berani, aku perempuan bisa berkarir, mengisi hari-hari bermanfaat, memotivasi anak-anak, dan yang terpenting adalah pembelajaran bagi kepemimpinan perempuan.

Hasil perhitungan suara resmi oleh panitia penyelenggara pemungutan suara kepala kampung Sidodadi, Kec. Bandar Surabaya-Lampung Tengah diperoleh. Dari tabel di bawah no. Urut 1 atas nama Mestifah memperoleh dukungan suara dari pemilih sebanyak 860 lebih unggul dari kandidat calon lainnya.

No Urut	Dusun														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 Mestifah	68	82	80	49	134	73	34	84	63	49	56	39	49	28	860
2 Suranto.S	33	78	22	3	10	3	47	14	27	5	3	1	46	6	292
3 Budiman	16	39	28	115	72	78	15	29	66	64	51	49	39	76	661
4 Sulistono	49	31	55	40	62	61	83	52	62	28	108	42	26	59	699
5 Jafar	63	74	88	31	63	30	63	150	62	19	46	65	55	12	809

VISI KONSORSIUM PERMAMPU

Perempuan mengalami dan menikmati pemenuhan
perlindungan dan penghormatan
Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (KHSR) yang lebih baik.

TUJUAN 1

Perempuan akar rumput (pedesaan, miskin kota, muda/usia 12-20 tahun
mempunyai kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi
untuk pemenuhan HKSR).

TUJUAN 2

Perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam
pelayanan HKSR yang mudah, cepat dan tepat dan bermutu.

TUJUAN 3

Institusi keluarga, adat dan agama melakukan perubahan
aturan adat dan tafsir agama
terkair HKSR (FMS).

TUJUAN 4

Pemerintah Desa dan Kab/Kota membuat kebijakan untuk
pemenuhan dan perlindungan HKSR.

WILAYAH CAKUPAN PROGRAM PERMAMPU



SEKRETARIAT PERMAMPU
Jl. Pancur Siwah No 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org Facebook: PermampuConsurtium